

**STUDI EKSPLORASI MANFAAT DANA PENGUATAN  
MODAL (DPM) BAGI PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2010-2013**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:

Rohmi Hidayatun

10404244025

**JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2015**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**STUDI EKSPLORASI MANFAAT DANA PENGUATAN MODAL**  
**(DPM) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI**  
**KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2010-2013**

**OLEH:**

**ROHMI HIDAYATUN**

**NIM. 10404244025**

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal 5 Januari 2015

Untuk diujikan dan dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi

Jurusan Pendidikan Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

**Mengetahui,**

**Dosen Pembimbing**



**Supriyanto M. M.**

**NIP. 19650720 200112 1 001**


## PENGESAHAN

### STUDI EKSPLORASI MANFAAT DANA PENGUATAN MODAL (DPM) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2010-2013

### SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
pada tanggal 12 Januari 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

#### Tim Penguji

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Losina Purnastuti, Ph. D.	Ketua Penguji		21/Jan '15
Supriyanto, M. M.	Sekretaris Penguji		21/Jan '15
Mustofa, M. Sc.	Penguji Utama		20/Jan '15

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Fakultas Ekonomi UNY

Dekan,



Dr. Sugharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohmi Hidayatun

NIM : 10404244025

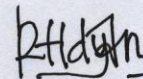
Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Judul Skripsi : Studi Eksplorasi Manfaat Dana Penguatan Modal (DPM) Bagi  
Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten  
Sleman Periode 2010-2013

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan oleh orang lain, kecuali pada bagian tertentu saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 5 Januari 2015

Yang Menyatakan,



Rohmi Hidayatun

NIM. 10404244025

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka.”

**(QS. Ar-ra'd: 11)**

“Sesungguhnya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”

**(QS. Alam Nasyarah: 6-7)**

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sekitarnya.”

**(HR. Ahmad dan Thabrani)**

“Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, maka Allah Swt menjadikan kekayaan dalam hatinya dan mengumpulkan sesuatu yang terserak dari dirinya, serta dunia akan datang kepadanya dalam kondisi tunduk.”

**(HR. Tirmidzi)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur pada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Orangtuaku tercinta, Bapakku Suratno dan Ibuku Dariyah. Karya ini tidak seberapa bagimu, tetapi ini aku buat untuk membahagiakanmu. Terima kasih atas kelembutan cinta, kasih sayang dan perjuanganmu selama ini. Terima kasih atas segala doa yang selalu dipanjatkan dan juga motivasi untukku.

Kubingkiskan kepada:

Kakak-kakakku Isro Chiatun Chasanah dan Tri Handoko, Nurul Khoiriyah dan Slamet Priyanto, serta adikku Latifa Kurnia Al-Fajri yang telah menjadi motivator dan memberikan dukungan selama ini. Tak lupa keponakan-keponakan kecilku Ivnya Najwa Muhanna, Alifa Azka Aulia dan Zianka Zizi Zivanka yang telah memberikan keceriaan dibalik kepolosan kalian. Semoga usahaku ini dapat menjadi panutan kelak.

**STUDI EKSPLORASI MANFAAT DANA PENGUATAN MODAL (DPM)  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2010-2013**

Oleh:  
Rohmi Hidayatun  
NIM. 10404244025

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penyaluran DPM, permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. DPM merupakan pinjaman dana bergulir yang disediakan pemerintah kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi dan UMKM.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan menurut metodenya merupakan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini pelaku UMKM yang menerima DPM di Kabupaten Sleman. Teknik sampling yang digunakan adalah *quota sampling* dengan jumlah responden sebanyak 50 pelaku UMKM. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM penerima DPM dapat merasakan manfaat dari program DPM. Bentuk manfaat penyaluran DPM antara lain pertumbuhan modal usaha, pendapatan usaha, nilai aset dan tabungan. Kendala yang dihadapi pelaku UMKM antara lain kurangnya pengetahuan manajemen usaha pelaku UMKM, ketidakdisiplinan pelaku UMKM dalam pengangsuran, kurangnya akses informasi DPM, jumlah DPM yang tidak mencukupi kebutuhan modal dan bencana alam.

**Kata Kunci: Dana Penguatan Modal, UMKM**

**AN EXPLORATORY STUDY OF BENEFITS OF CAPITAL  
STRENGTHENING FUNDS (CSF) FOR MICRO-, SMALL-, AND  
MEDIUM-ENTERPRISES OWNERS IN SLEMAN REGENCY IN THE  
PERIOD OF 2010-2013**

by:  
Rohmi Hidayatun  
NIM. 10404244025

**ABSTRACT**

This study aims to investigate benefits of the CSF distribution, problems and constraints faced by micro-, small-, and medium-scale enterprises (MSMEs) owners in Sleman Regency. CSF is a revolving funds by government to the personal, farmer group, cooperation and MSMEs.

This was an exploratory study employing the descriptive research method. The research population comprised MSMEs owners receiving CSF in Sleman Regency. The sampling technique was the quota sampling technique to select the sample consisting of 50 MSMEs owners as respondents. The data were collected through a questionnaire, interviews, and documentation. They were analyzed by means of the descriptive technique.

The results of the study showed that MSMEs owners receiving CSF got benefits of the CSF program. Forms of the benefits of the CSF distribution included: business capital growth, business earnings, asset values, savings, and improvement of the number of employees. Constraints that MSMEs owners faced included their lack of business management knowledge, their lack of discipline in the installment, their lack of access to CSF information, the amount of CSF inadequate to fulfill capital needs, and natural disasters.

**Keywords: Capital Strengthening Funds, MSMEs**



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Eksplorasi Manfaat Dana Penguatan Modal (Dpm) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Periode 2010-2013” dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Daru Wahyuni, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah membantu banyak hal dalam masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir skripsi.
3. Supriyanto, M.M., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian serta memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
4. Mustofa, M.Sc., selaku narasumber dan penguji utama yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Maimun Sholeh, M. Si., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihatnya selama masa studi.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
7. Seluruh staf dan jajaran kepegawaian KP3M Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin, ruang dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Seluruh teman-teman pendidikan ekonomi, khususnya teman-teman angkatan 2010 kelas B (Pioneer) yang telah menjadi sahabat yang baik dalam masa perkuliahan. Aku akan selalu merindukan kalian, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga bantuan baik yang bersifat moral maupun material selama penelitian hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini dapat menjadi amal baik dan ibadah, serta mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 5 Januari 2015

Penulis



Rohmi Hidayatun

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Deskripsi Teori .....	13
1. Tinjauan Kesejahteraan Masyarakat .....	13
a. Pengertian Kesejahteraan.....	13
b. Faktor Penghambat Kesejahteraan.....	15
2. Tinjauan Program Pemberdayaan Masyarakat .....	16
a. Pengertian Program Pemberdayaan .....	16
b. Pendekatan Dalam Program Pemberdayaan .....	18

3. Tinjauan Program Dana Penguatan Modal .....	19
a. Pengertian Program DPM .....	19
b. Tujuan dan Sasaran Program DPM .....	21
c. Ketentuan Umum Program DPM.....	22
d. Efektivitas Program DPM.....	26
4. Tinjauan Permodalan .....	27
a. Pengertian Modal .....	28
b. Jenis Modal.....	29
c. Sumber Modal.....	30
d. Peran Penguatan Modal .....	34
5. Tinjauan Kewirausahaan.....	35
a. Pengertian Kewirausahaan.....	35
b. Motivasi Kewirausahaan.....	36
6. Tinjauan UMKM .....	38
a. Pengertian UMKM.....	38
b. Kelebihan dan Kekurangan UMKM.....	40
c. Peran UMKM.....	43
d. Permasalahan dalam UMKM.....	44
B. Penelitian yang Relevan.....	46
C. Kerangka Pikir .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Desain Penelitian .....	52
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	53
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	53
D. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Deskripsi Obyek Penelitian .....	57

a. Profil Kabupaten Sleman .....	57
b. Profil KP3M Kabupaten Sleman .....	58
2. Deskripsi Data Penelitian.....	61
a. Karakteristik Responden .....	61
b. Karakteristik Usaha .....	64
c. Karakteristik DPM .....	71
3. Deskripsi Hasil Penelitian .....	80
a. Kemanfaatan DPM.....	80
b. Bentuk Kemanfaatan DPM .....	85
c. Permasalahan dan Kendala dalam DPM .....	95
B. Pembahasan.....	97
1. Kemanfaatan DPM .....	97
2. Bentuk Kemanfaatan DPM.....	98
3. Permasalahan dan Kendala dalam DPM.....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
C. Keterbatasan Penelitian.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Perkembangan Data UMKM dan UB di Indonesia .....	4
2. Persentase Perkembangan UMKM Tahun 2011-2013 di Sleman .....	6
3. Kelebihan dan Kekurangan Modal Sendiri dan Pinjaman .....	32
4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian .....	56
5. Responden Berdasar Jenis Kelamin .....	62
6. Responden Berdasar Rentang Usia .....	62
7. Responden Berdasar Tingkat Pendidikan .....	63
8. Karakteristik Usaha Berdasar Bidang Usaha .....	64
9. Karakteristik Usaha Berdasar Lama Usaha .....	65
10. Karakteristik Usaha Berdasar Sumber Modal Awal .....	66
11. Karakteristik Usaha Berdasar Status dan Lokasi Tempat Usaha .....	67
12. Karakteristik Usaha Berdasar Alasan Awal Usaha .....	68
13. Karakteristik Usaha Berdasar Jumlah Tenaga Kerja .....	69
14. Karakteristik Usaha Berdasar Aset Usaha .....	69
15. Karakteristik Usaha Berdasar Omset Usaha .....	70
16. Besarnya Pinjaman DPM .....	71
17. Penggunaan Pinjaman DPM .....	71
18. Besar Angsuran DPM Tiap Bulan .....	72
19. Persepsi Responden Mengenai Besarnya Angsuran .....	73
20. Persepsi Besarnya Kontribusi .....	74
21. Sumber Informasi DPM .....	75
22. Ketepatan Waktu Pembayaran .....	76
23. Gangguan Pemanfaatan DPM .....	76
24. Jenis Gangguan Pemanfaatan DPM .....	77
25. Pelaksanaan Survei, Verifikasi dan Pemantauan .....	78
26. Layanan Lain dari KP3M selain DPM .....	79

27. Bentuk Layanan Selain DPM .....	79
28. Data Kemanfaatan DPM .....	81
29. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menerima DPM .....	85
30. Kendala dalam Pengelolaan DPM .....	95
31. Bentuk Kendala dalam Pengelolaan DPM .....	96

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Persentase Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2009-2012 .....	5
2. Kerangka Pikir Penelitian .....	51
3. Kemanfaatan DPM.....	82
4. Perbandingan Modal Sebelum dan Setelah DPM.....	86
5. Perbandingan Tenaga Kerja Sebelum dan Setelah DPM.....	88
6. Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Setelah Menerima DPM.....	90
7. Perbandingan Nilai Aset Sebelum dan Setelah DPM .....	92
8. Perbandingan TabunganSebelum dan Setelah DPM .....	94



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Populasi Penelitian .....	111
2. Daftar Sampel Penelitian .....	114
3. Instrumen Penelitian .....	116
4. Data Pengisian Angket .....	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan perubahan progresif yang berkelanjutan untuk mempertahankan kepentingan individu maupun komunitas. Salah satu dimensi pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Hal ini seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk melihat pemerataan tingkat kesejahteraan suatu negara dapat menggunakan angka Indeks Koefisien Gini. Rentang angka Indeks Koefisien Gini adalah 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi angka indeks koefisien gini maka semakin besar nilai ketimpangan kesejahteraan dalam negara tersebut. Indeks Koefisien Gini negara Indonesia dari tahun 2009 ke 2011 telah meningkat dari 0,37 ke 0,41. Dengan melihat peningkatan koefisien gini tersebut, dapat digambarkan masih belum meratanya kesejahteraan antar penduduk.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum yang merata terutama bagi sektor ekonomi rakyat, pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah berupaya merancang berbagai program pengembangan terutama untuk penduduk berpendapatan rendah serta usaha mikro kecil dan menengah. Program pengembangan sektor ekonomi rakyat merupakan program yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat agar lebih

mandiri dan sejahtera. Mubyarto (2001: 31) menjelaskan sektor ekonomi rakyat memang membutuhkan program yang bersifat pemberdayaan dan bukan bersifat penyelamatan karena sektor ekonomi rakyat sudah terbukti mampu menyelamatkan diri dari hantaman krisis ekonomi. Oleh karena itulah pada program pengembangan sektor ekonomi rakyat, masyarakat dituntut mampu memberdayakan diri sendiri agar lebih sejahtera. Kunci keberhasilan program pengembangan sektor ekonomi rakyat semata-mata bukan hanya terletak pada pemerintah sebagai pemberi program akan tetapi juga terletak pada masyarakat itu sendiri sebagai penerima program.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sistem pemerintahan berubah menjadi corak desentralisasi sehingga setiap daerah provinsi dan kabupaten berhak membuat peraturan daerah dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk dalam hal perekonomian daerah dan pengelolaan sumber daya alam daerah. Hal ini dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk bebas menetapkan kebijakan, khususnya kebijakan penyusunan program pemberdayaan masyarakat yang sesuai untuk daerahnya masing-masing.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 25 daerah/kota di seluruh Indonesia yang dijadikan proyek percontohan uji coba Otonomi Daerah pada tahun 2000 yang lalu. Kabupaten Sleman yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini memiliki visi mewujudkan masyarakat Sleman yang sejahtera, berdaya saing dan berkeadilan gender. Sementara beberapa misi yang dicanangkan antara lain meningkatkan

kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan melalui keterpaduan program pemerintah, swasta dan masyarakat (Perda Sleman No. 9 Tahun 2010 tentang RPJMD tahun 2011-2015). Salah satu program unggulan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah program Dana Penguatan Modal (DPM).

Program DPM adalah program pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak bagi para pelaku usaha di Sleman yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Bunga atau kontribusi DPM ini sangatlah ringan yaitu 0,5% per bulan atau 6% per tahun. Jangka waktu pengembalian DPM bisa sampai dengan 48 bulan atau 4 (empat) tahun. DPM dikelola oleh Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) Kabupaten Sleman dibantu dengan dinas/instansi teknis terkait. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang DPM dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur DPM, sasaran dari DPM ini adalah meningkatnya kinerja usaha orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah penerima DPM; dan meningkatnya pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja di wilayah sekitar tempat usaha penerima dana. Dengan bunga lunak dan jangka waktu pengembalian yang cukup panjang, DPM bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan modal usaha yang mudah dijangkau semua kalangan pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan skala usahanya, unit usaha di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB). UMKM sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM). UMKM sendiri merupakan salah satu subjek utama penerima DPM. Berdasarkan klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM merupakan kegiatan usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang. Meskipun memiliki tenaga kerja yang relatif sedikit di tiap unitnya, UMKM diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain memiliki jumlah unit usaha yang banyak, UMKM juga memiliki posisi penting dalam penyerapan tenaga kerja. Data mengenai perkembangan jumlah unit UMKM di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

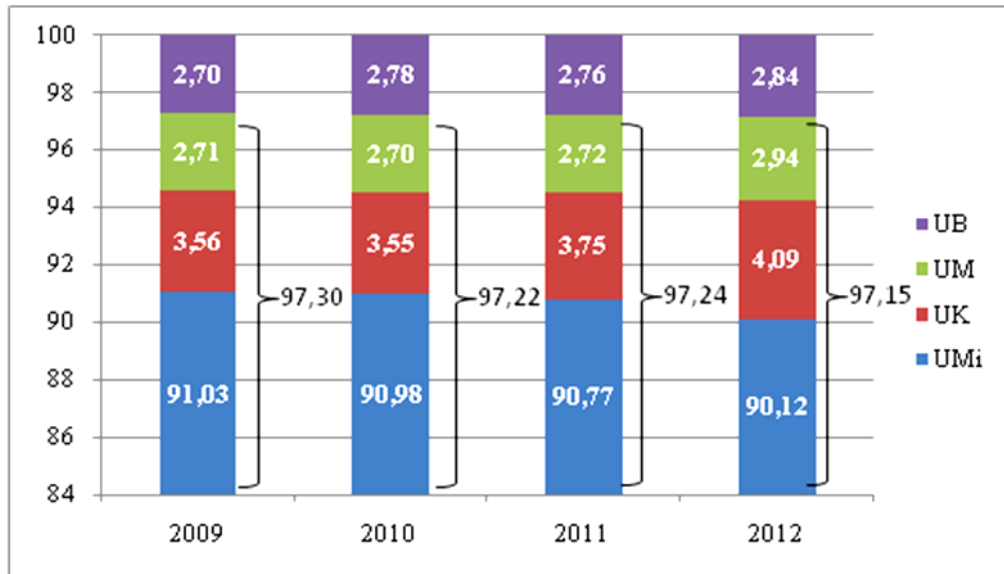
Tabel 1. Perkembangan Data UMKM dan UB Berdasarkan Skala Usaha

No	Skala Usaha	2009		2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>1.</b>	<b>UMKM</b>	<b>52.764.750</b>	<b>99,99</b>	<b>53.823.732</b>	<b>99,99</b>	<b>55.206.444</b>	<b>99,99</b>	<b>56.534.592</b>	<b>99,99</b>
	a. UMi	52.176.771	98,88	53.207.500	98,85	54.559.969	98,82	55.856.176	98,79
	b. UK	546.643	1,04	573.601	1,07	602.195	1,09	629.418	1,11
	c. UM	41.336	0,08	42.631	0,08	44.280	0,08	48.997	0,09
<b>2.</b>	<b>UB</b>	<b>4.676</b>	<b>0,01</b>	<b>4.838</b>	<b>0,01</b>	<b>4.952</b>	<b>0,01</b>	<b>4.968</b>	<b>0,01</b>
	Total (1+2)	52.769.426	100	53.828.569	100	55.211.396	100	56.539.560	100

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah unit UMKM periode 2009-2012 terus meningkat dari tahun ke tahun. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dengan persentasenya sebesar 99,99 persen dari total pelaku usaha nasional pada tahun 2009-2012. Selain memiliki jumlah unit usaha yang besar, UMKM juga berperan dalam penyerapan

tenaga kerja. Data mengenai proporsi jumlah tenaga kerja UMKM dan UB dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 1. Persentase Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2009-2012

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UMKM lebih fluktuatif dibandingkan dengan jumlah unit usahanya. Pada tahun 2009, tercatat UMKM menyerap 97,30 persen tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2010 persentase jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM turun 0,08 persen menjadi 97,22 persen. Sedangkan pada tahun 2011, persentase jumlah tenaga kerja di UMKM naik kembali meskipun kenaikannya tidak lebih besar daripada penurunan di tahun sebelumnya yaitu naik 0,02 persen menjadi 97,24 persen. Pada tahun 2012, persentase jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM kembali menurun 0,09 persen menjadi 97,15 persen.

Dalam skala lokal, perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman dari unit usaha maupun jumlah tenaga kerja masih sangat fluktuatif. Berikut ini

tersaji data perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2013:

Tabel 2. Persentase Perkembangan Usaha Tahun 2011-2013

No.	Indikator	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Unit Usaha						
	a. UMKM	15.449	99,26	15.707	99,19	15.841	99,15
	b. UB	115	0,74	128	0,81	136	0,85
	<b>Total</b>	<b>15.564</b>	<b>100</b>	<b>15.835</b>	<b>100</b>	<b>15.977</b>	<b>100</b>
2	Tenaga Kerja						
	a. UMKM	43.602	67,82	43.963	67,71	44.097	67,51
	b. UB	20.689	32,18	20.965	32,29	21.222	32,49
	<b>Total</b>	<b>64.291</b>	<b>100</b>	<b>64.928</b>	<b>100</b>	<b>65.319</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Tahunan Disperindagkop Sleman 2013 (diolah)

Pada tahun 2011, jumlah unit UMKM di Sleman mencapai 99,26 persen dan menurun pada tahun 2012 menjadi 99,19 persen. Pada tahun 2013, jumlah unit UMKM kembali menurun 0,04 persen menjadi 99,15 persen. Pada tahun 2011 UMKM mampu menyerap 67,82 persen tenaga kerja di Sleman. Akan tetapi pada tahun 2012, tenaga kerja yang bekerja di UMKM menurun 0,11 persen menjadi 67,71 persen. Penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM juga terjadi pada tahun 2013 menjadi sekitar 67,51 persen. Perkembangan UMKM yang masih sangat fluktuatif tersebut membuktikan UMKM masih perlu diperkuat dengan program-program intervensi dari pemerintah.

Berdasarkan studi mengenai usaha kecil, ada banyak menjadi permasalahan yang dihadapi UMKM. Mudrajad Kuncoro (2007: 368) menyebutkan beberapa permasalahan dasar yang dialami para pengusaha UMKM antara lain yang pertama kelemahan dalam memperoleh peluang

pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha UMKM (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap UMKM.

Telah disebutkan di atas, bahwa pemerintah daerah Sleman telah menyusun program DPM sebagai program pemberdayaan UMKM. Dengan adanya DPM ini, permasalahan dasar yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya terutama kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan dapat teratasi. Program DPM bisa menjadi salah satu akses bagi UMKM guna menambah modal pengembangan usaha.

Dengan adanya penambahan modal dari program DPM, UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan usahanya. Peningkatan pendapatan ini tentu saja bisa digunakan UMKM untuk melakukan berbagai macam pembayaran kebutuhan dan kewajiban. Salah satu pembayaran kewajiban yang harus dilakukan merupakan kewajiban membayar pinjaman termasuk pinjaman DPM. Akan tetapi berdasarkan laporan KP3M, diperoleh data bahwa kelompok UMKM khususnya bidang perindustrian pada tahun 2013 memiliki tunggakan DPM sebesar 17,35% dari



penyaluran dana. Nilai tunggakan adalah perbandingan jumlah pinjaman yang disalurkan dengan jumlah pinjaman yang kembali. Persentase tunggakan pada kelompok UMKM termasuk persentase tunggakan yang besar bila dibandingkan dengan kelompok lain. Walaupun masih di bawah kelompok Tenaga Kerja (TK) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 37,65%, kelompok UMKM memiliki persentase tunggakan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) yang memiliki Persentase tunggakan hanya 4,07%, koperasi yaitu 3,42% dan Unit Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebesar 3,90%. Dengan melihat data tunggakan tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya permasalahan yang terjadi dalam penyaluran DPM.

Program DPM ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kinerja UMKM, peningkatan pendapatan UMKM dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di sekitar UMKM. Namun dari laporan KP3M diperoleh data bahwa kelompok UMKM khususnya bidang perindustrian memiliki tunggakan DPM yang cukup tinggi terutama bila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Jadi, apakah benar dengan adanya program DPM ini dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan bagi UMKM di Sleman dan apakah ada kendala atau permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan DPM akan menjadi tujuan diadakannya penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini akan mengambil judul **“Studi Eksplorasi Manfaat Dana Penguatan Modal (DPM) bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Sleman Periode 2010-2013”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul. Adapun masalah tersebut antara lain:

1. Kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah. Akan tetapi kesejahteraan umum belum terwujud sepenuhnya.
2. Perkembangan UMKM berdasarkan skala usaha dan penyerapan tenaga kerja dalam skala nasional maupun lokal masih fluktuatif.
3. Kelemahan pengusaha UMKM dalam memperoleh peluang pasar.
4. Kelemahan UMKM dalam struktur permodalan.
5. Keterbatasan UMKM dalam memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
6. Kelemahan UMKM dalam bidang organisasi dan manajemen SDM.
7. Keterbatasan sistem informasi pemasaran UMKM.
8. Iklim usaha yang kurang kondusif bagi UMKM karena persaingan yang mematikan.
9. Pembinaan yang kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap UMKM.
10. Besarnya tunggakan UMKM khususnya bidang industri terhadap pinjaman DPM yang cukup tinggi (17,35%) bila dibandingkan dengan sektor TPH (4,07%), koperasi (3,42%) dan UPPKS (3,90%).

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada kajian manfaat dan kendala yang dirasakan oleh penerima DPM khusus pada kelompok UMKM termasuk bidang perindustrian. Kelompok UMKM yang dimaksud adalah UMKM penerima DPM di Sleman periode 2012 dan 2013 yang belum jatuh tempo dan UMKM penerima DPM sebelum periode 2012 dan 2013 yang belum bisa melunasi pinjaman DPM.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka bisa dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penyaluran DPM bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana bentuk manfaat penyaluran DPM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Sleman dalam rangka pengelolaan DPM?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manfaat penyaluran DPM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui bentuk manfaat penyaluran DPM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Sleman dalam rangka pengelolaan DPM.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama tentang kebermanfaatan program pemberdayaan masyarakat khususnya program pinjaman DPM.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sarana latihan dari kenyataan yang ada di lapangan untuk diaplikasikan dengan pengetahuan yang diperoleh peneliti di bangku kuliah.
  - c. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang membutuhkan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi/Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebermanfaatan program DPM bagi masyarakat sasaran serta dapat memberi masukan dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah ke depan.
  - b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebermanfaatan program DPM bagi masyarakat sasaran

serta dapat memberi masukan dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah ke depan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Tinjauan Kesejahteraan Masyarakat**

###### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan meliputi program rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Badan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kesejahteraan adalah kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka (Adi Fahrudin, 2012: 9). Menurut Edy Suharto (2006: 3) kesejahteraan adalah suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh orang-perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Arthur Dunham dalam T. Sumarnonugroho (1987: 28-31), kesejahteraan adalah kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Adi Fahrudin (2012: 12) mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diperoleh pengertian kesejahteraan adalah suatu kondisi terpenuhinya berbagai kebutuhan baik kebutuhan materi, spiritual maupun sosial setiap warga masyarakat sehingga dapat menjalani hidup yang layak dan berkualitas serta dapat mengembangkan diri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Aspek kesejahteraan meliputi aspek pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbatasan kemiskinan dan sebagainya. Terpenuhinya aspek-aspek tersebut sangat ditentukan oleh kondisi masyarakat yang bersangkutan sehingga dengan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat itu. ekonomi yang baik adalah keadaan ekonomi yang terus tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat disumbang dari pertumbuhan berbagai

sektor ekonomi yang secara tidak langsung juga menggambarkan perubahan ekonomi yang terjadi. Indikator perubahan ekonomi inilah yang biasanya digunakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara umum ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Bruto (PDRB). Nilai PDRB menunjukkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan dari perkembangan unit-unit produksi yang dikelola daerah. Perkembangan unit-unit produksi dalam skala mikro akan mempengaruhi kesejahteraan pelaku usaha di dalamnya. Dengan demikian peningkatan nilai tambah yang dihasilkan unit-unit produksi dalam suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha.

b. Faktor Penghambat Kesejahteraan

Ada berbagai macam faktor yang menjadi terhambatnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor tersebut adalah ketidaktepatan program yang dirancang pemerintah. Ketidaktepatan program yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah berupa penyaluran program bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak merata. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan namun ternyata diberikan kepada masyarakat yang



sudah cukup mampu. Untuk mendukung iklim usaha, pemerintah telah merancang program pendorong keberhasilan usaha pelaku ekonomi terutama pelaku ekonomi UMKM. Salah satu programnya adalah program bantuan permodalan dan program pendukung pemberdayaan modal usaha. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat dibutuhkan UMKM. Diharapkan bantuan permodalan bagi UMKM ini bisa tepat sasaran dan berdaya guna. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketidaktepatan pengelolaan bantuan oleh penerimanya. Pelaku UMKM yang merupakan pelaku usaha dari kelas bawah pada umumnya tidak memiliki kemampuan dan pengalaman manajemen usaha yang baik sehingga dalam mengolah bantuan yang diberikan pemerintah kurang optimal.

## 2. Tinjauan Program Pemberdayaan Masyarakat

### a. Pengertian Program Pemberdayaan

“Pemberdayaan” berasal dari kata “daya” artinya kekuatan yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki daya atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan berarti membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki kekuatan.

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata *empowerment* dalam bahasa Inggris. Dalam *Oxford English Dictionary*, kata *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan untuk memungkinkan.
- 2) *To give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Carlzon dan Macauley menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah pembebasan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya (Wasistiono Sadu, 1998: 46). Sementara itu, Carver dan Clatter Back dalam Wasistiono (1998: 48) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberi keberanian dan kesempatan bagi para individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi.

Menurut Sunyoto Usman (2004: 25), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Prinsip yang dikedepankan dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemauan, pengetahuan dan kemampuannya sendiri.

Dari beberapa definisi pemberdayaan dari berbagai pihak tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa program pemberdayaan adalah program yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menentukan tindakan yang akan diambil sehingga masyarakat memiliki kekuatan dan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada apapun termasuk pada program itu sendiri. Salah satu program pemberdayaan di Kabupaten Sleman adalah program DPM, dengan adanya program DPM ini pemerintah berharap masyarakat penerima DPM dapat berkembang secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah.

b. Pendekatan Dalam Program Pemberdayaan

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan objek proyek pembangunan, akan tetapi merupakan sebuah subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Nindita (dalam Alfitri, 2011: 35) dalam pemberdayaan masyarakat harus memenuhi tiga pendekatan sebagai berikut:

- 1) Upaya pemberdayaan harus terarah. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan kebutuhannya.
- 2) Program pemberdayaan harus mengikutsertakan, bahkan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai

dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

- 3) Program pemberdayaan ini harus menggunakan pendekatan kelompok. Hal ini dikarenakan secara sendiri-sendiri masyarakat miskin akan sulit memecahkan masalah yang dihadapinya. Selain itu, dalam lingkup bantuan akan terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok merupakan paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

### 3. Tinjauan Program Dana Penguatan Modal

#### a. Pengertian Program DPM

Dana Penguatan Modal (DPM) merupakan program pinjaman dana bergulir yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, UMKM dan unit pengelola program pemberdayaan masyarakat serta lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan sebagai tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Dasar yang digunakan dalam pelaksanaan DPM adalah:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal;
- 3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal Kabupaten Sleman;
- 4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Dana Penguatan Modal;
- 5) Keputusan Bupati Sleman Nomor 129/Kep.KDH/A/2010 tentang Pengelola Dana Penguatan Modal.

Setiap awal tahun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, KP3M Kabupaten Sleman sebagai pengelola utama, berkoordinasi dengan instansi teknis untuk menentukan plafon DPM. Alokasi DPM ditentukan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah/instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menangani pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sesuai dengan jenis bidang DPM. Instansi teknis yang menangani UMKM adalah Dinas Peindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Sumber dana program ini berasal dari:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - 4) Pengembalian angsuran pokok dana penguatan modal.
- b. Tujuan dan Sasaran Program DPM

DPM dikelola oleh KP3M dengan dibantu instansi teknis terkait. tujuan pengelolaan DPM sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman DPM antara lain:

- 1) Mengelola dana penguatan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber-sumber lainnya yang telah disalurkan kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah utamanya memantau pengembalian angsuran pokok maupun kontribusi;
- 2) Melaksanakan tertib administrasi terhadap pengembalian angsuran dana penguatan modal di masing-masing jenis bidang dana penguatan modal untuk mengidentifikasi penerima dana penguatan modal agar seminimal mungkin menunggak;
- 3) Memperkuat aspek permodalan bagi orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah dalam mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan kinerja usahanya;
- 4) Mengembangkan produktivitas bagi orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah sehingga dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Sementara itu, sasaran program DPM adalah meningkatkan kinerja usaha penerima DPM, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja di wilayah tempat usaha penerima DPM.

c. Ketentuan Umum Program DPM

Untuk memperluas jangkauan program dana penguatan modal, sasaran pemberian DPM meliputi:

- 1) Orang pribadi;
- 2) Kelompok tani, termasuk kelompok lumbung pangan dan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM);
- 3) Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- 4) Koperasi;
- 5) Usaha Kecil dan Menengah (UKM), termasuk kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kelompok PKK Padukuhan, kelompok Kegiatan Perlindungan Anak (kelompok PAUD dan kelompok Pendukung ASI), pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL).

Program DPM merupakan pinjaman dana bergulir sehingga penerima DPM diwajibkan mengembalikan dana pinjaman beserta

bunga. Pembebanan bunga dalam DPM dimaksudkan agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab mengembalikan DPM. Istilah bunga dalam DPM pun diganti dengan istilah “kontribusi”. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan DPM. Penerima DPM wajib memberikan kontribusi sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total DPM yang diterimanya selama jangka waktu pemberian DPM. Kontribusi wajib dibayarkan selama masa tenggang (*grace period*). Masa tenggang adalah masa pada awal periode angsuran dimana penerima dana tidak membayar angsuran pokok tetapi diwajibkan membayar kontribusi saja. Masa tenggang DPM adalah selama 4 (empat) bulan. Jangka waktu pengembalian DPM paling lama adalah 48 bulan atau 4 tahun, akan tetapi untuk UMKM pada umumnya jangka waktu pengembalian DPM adalah 24 bulan atau 2 (dua) tahun dengan periode pengembalian tiap bulan atau bulanan.

Dalam program DPM diterapkan peraturan *reward and punishment*. Bagi penerima dana melakukan pembayaran tepat waktu maka penerima dana tersebut akan menerima *reward* (penghargaan) berupa prioritas dalam memperoleh DPM untuk periode berikutnya. Sebaliknya, bagi penerima dana yang terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana, akan dikenakan *punishment* atau sanksi berupa denda sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) setiap bulannya dan berlaku



kelipatannya serta paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok angsuran.

Untuk melakukan pinjaman DPM, kelompok UMKM wajib menyediakan agunan. Agunan yang disediakan oleh penerima dana penguatan modal khususnya UMKM minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Agunan dapat berupa tanda bukti hak kepemilikan tanah (sertifikat) dan atau bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Nilai agunan minimal 1,25 (satu koma dua lima) kali lipat dari nilai pengajuan dana penguatan modal atau nilai dana penguatan modal yang diterima. Penghitungan nilai agunan berupa tanda bukti hak kepemilikan tanah (sertifikat) berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atau surat keterangan nilai taksir jual tanah dari pemerintah desa setempat. Penghitungan nilai agunan berupa BPKB berdasarkan harga pasar atau penaksiran dari tim penilai dengan memperhitungkan penyusutan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian dana penguatan modal.

Untuk mengakses program DPM, Pemkab. Sleman memberikan beberapa kriteria yaitu:

1) Kriteria Umum

- a) Memiliki kegiatan usaha dan beroperasi secara nyata dalam masyarakat;
- b) Tidak sedang menerima dana dari program yang sejenis;

- c) Mempunyai perencanaan yang terarah dalam hal pemanfaatan dana penguatan modal.

## 2) Kriteria Khusus

Selain kriteria umum, untuk mengajukan program DPM juga memiliki kriteria khusus. Kriteria khusus merupakan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi teknis. Untuk instansi teknis yang menangani UMKM adalah Disperindagkop. Kriteria khusus yang ditetapkan oleh Disperindagkop bagi UMKM yang ingin menerima DPM adalah UMKM yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Dana penguatan modal yang diberikan adalah upaya untuk menggerakkan usaha ekonomi rakyat melalui mekanisme dana penguatan modal. Kelancaran pengembalian dana penguatan modal dari penerima dana penguatan modal merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana penguatan modal sehingga dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat lainnya. Penerima dana penguatan modal mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Menerima dana penguatan modal sesuai hasil kelayakan usaha yang telah ditetapkan oleh tim pengelola dana penguatan modal;
- 2) Mendapatkan pembinaan, pendampingan dan pemantauan dari instansi teknis terkait dan atau kantor penanaman, penguatan dan penyertaan modal Kabupaten Sleman.

Adapun kewajiban penerima dana penguatan modal adalah:

- 1) Memanfaatkan dana penguatan modal sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
- 2) Mengembalikan dana penguatan modal beserta kontribusinya sesuai dengan jangka waktu pengembalian sebagaimana tercantum dalam perjanjian;
- 3) Menyampaikan tembusan bukti setor angsuran warna biru dari Bank BPD DIY secara berkala kepada KP3M Kabupaten Sleman melalui instansi teknis terkait;
- 4) Menyampaikan laporan penggunaan dana penguatan modal;
- 5) Melaporkan perkembangan usahanya secara berkala kepada KP3M Kabupaten Sleman melalui instansi teknis terkait.

d. Efektivitas Program DPM

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ruswati (2005: 41) yang menyatakan bahwa efektivitas

adalah tercapainya sasaran atau tujuan suatu program yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, suatu program dapat dikatakan efektif apabila program tersebut dalam proses pengimplementasiannya dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga untuk mengukur efektivitas program DPM maka yang perlu diperhatikan adalah ketercapaian tujuan atau sasaran program DPM. Sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan di atas, ada tiga sasaran program DPM yaitu meningkatkan kinerja usaha penerima DPM, meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan penerima DPM secara khusus serta memperluas kesempatan kerja di wilayah tempat usaha penerima DPM. Maka dapat disimpulkan program DPM dikatakan efektif jika dapat:

- 1) Meningkatkan kinerja usaha penerima DPM;
- 2) Meningkatkan pendapatan usaha penerima DPM;
- 3) Memperluas kesempatan kerja di sekitar wilayah tempat usaha penerima DPM

#### 4. Tinjauan Permodalan

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi diperlukan tersedianya faktor-faktor produksi yang terdiri dari:

- a. Sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, pendidikan, disiplin, motivasi dan lain-lain)

- b. Sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar, iklim dan lain-lain)
- c. Pembentukan modal (mesin-mesin, pabrik, jalan raya dan lain-lain)
- d. Tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan dan lain-lain)

Di antara faktor-faktor tersebut, modal memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai penggerak roda perekonomian. Barang modal terdiri dari berbagai barang yang dapat digunakan untuk membuat barang lainnya seperti mesin traktor dan lainnya. Barang modal dimanfaatkan untuk menghasilkan output. Intensifikasi modal akan meningkatkan output dan pendapatan yang semakin meningkat (Rahardjo Adisasmita, 2013: 44).

#### a. Pengertian Modal

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin-izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Modal yang pertama kali dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan (prainvestasi), mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri, dalam artian memiliki badan usaha (Kasmir, 2006: 90).

b. Jenis Modal

Pada dasarnya terdapat dua jenis kebutuhan modal untuk usaha, yaitu; modal investasi dan modal kerja. Modal investasi merupakan modal yang digunakan dalam jangka waktu panjang biasanya lebih dari setahun serta dapat digunakan tidak hanya sekali akan tetapi berulang-ulang. Penggunaan utama modal ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan atau gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan inventaris lainnya. Modal ini biasanya memiliki porsi terbesar dalam komponen pembiayaan suatu usaha dan dikeluarkan pada awal berdirinya perusahaan atau pada saat diadakan perluasan pabrik. Modal investasi diperoleh dari modal pinjaman jangka panjang biasanya dari lembaga keuangan bank (Kasmir, 2006: 91).

Sedangkan modal kerja digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek seperti untuk operasional perusahaan. Modal ini digunakan hanya untuk sekali atau beberapa kali proses produksi saja. Contoh kebutuhan yang dibiayai modal kerja antara lain pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya pemeliharaan dan lain-lain. modal kerja ini juga bisa diperoleh dari lembaga keuangan bank (biasanya kurang dari setahun). Kebutuhan modal kerja ini biasanya dipenuhi setelah modal inventasi terpenuhi (Kasmir. 2006: 92).

c. Sumber Modal

Dalam memenuhi kebutuhan modal dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu bersumber dari modal sendiri dan diperoleh dari modal pinjaman (modal asing). Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik usaha sendiri. Sedangkan modal pinjaman atau modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan (Kasmir, 2006: 93).

Modal sendiri ini dapat diperoleh perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham merupakan tanda kepemilikan usaha. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat bersifat tertutup dan terbuka. Dengan mengeluarkan saham, perusahaan dapat memperoleh tambahan modal tanpa perlu mengeluarkan beban bunga akan tetapi hanya membayar dividen. Besarnya dividen tergantung dari besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. akan tetapi pengeluaran saham guna memperoleh tambahan modal ini selain sulit memperolehnya, juga memiliki jumlah yang terbatas. Bagi perusahaan yang sudah atau sedang berjalan dapat memperoleh saham dari cadangan laba yang belum dibagi walaupun penggunaan modal ini hanya dapat digunakan untuk sementara waktu saja. Untuk usaha tertentu, dapat menggunakan modal sumbangan atau hibah dari pihak lain (Kasmir, 2006: 95-96).

Kasmir (2006: 94) mengungkapkan bahwa penggunaan modal pinjaman akan menimbulkan biaya tambahan berupa biaya bunga, biaya administrasi ataupun biaya lainnya. Penggunaan modal ini juga memiliki jangka waktu pengembalian tertentu atau yang sering disebut jangka waktu jatuh tempo. Keunggulan dari penggunaan modal pinjaman adalah modal ini tersedia dalam jumlah banyak. Selain itu, dikarenakan adanya tuntutan jangka waktu pengembalian dapat meningkatkan motivasi dari pihak manajemen dalam menjalankan usahanya. Modal pinjaman ini dapat berasal dari:

- 1) Pinjaman dari dunia perbankan.
- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan non bank, seperti pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dan lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan nonkeuangan.

Penggunaan sumber modal pada praktiknya mempertimbangkan jumlah modal yang diperlukan dan kebijakan pemilik perusahaan. Dalam praktiknya pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Pada awal berdirinya suatu usaha, biasanya perusahaan lebih menitikberatkan pada modal sendiri. Hal ini biasanya dikarenakan kesulitan memperoleh modal pinjaman terutama dari lembaga keuangan bank. Namun, perusahaan tetap dapat



memperoleh pinjaman melalui lembaga keuangan non bank seperti dari lembaga pegadaian ataupun *leasing*.

Berikut ini kelebihan dan kekurangan masing-masing modal sendiri dan modal pinjaman (Kasmir, 2006: 97):

Tabel 3. Kelebihan dan Kekurangan Modal Sendiri dan Pinjaman

Sumber Modal	Modal Sendiri	Modal Pinjaman
<b>Kelebihan</b>	Beban perusahaan lebih ringan karena tidak harus membayar biaya bunga dan biaya administrasi	Jumlah modal tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber.
	Tidak memiliki ketergantungan dengan pihak lain karena perolehan dana dari setoran pemilik perusahaan	Motivasi usaha tinggi karena memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga kepercayaan pemberi pinjaman.
	Modal yang diperoleh tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan membutuhkan waktu lama	
	Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain	
<b>Kekurangan</b>	Jumlah terbatas, artinya untuk memperoleh modal dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.	Dikenakan biaya tambahan seperti biaya bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi.
	Perolehan dari modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (seperti calon pemegang saham baru) relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha.	Harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.
	Kurang motivasi karena tidak ada kewajiban pengembalian modal.	Beban moral karena apabila perusahaan mengalami kerugian akan berdampak terhadap pinjaman yang belum dibayar.

Sumber: Kasmir, 2006

Dalam bukunya, Kasmir (2006: 94) mengungkapkan beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan perusahaan agar dapat memperoleh suatu modal yaitu:

1) Tujuan perusahaan

Perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan pinjaman modal tersebut apakah untuk kebutuhan modal investasi atau modal kerja, apakah sebagai modal utama atau modal tambahan serta apakah untuk kebutuhan mendesak atau tidak.

2) Masa pengembalian modal

Masa pengembalian modal merupakan jangka waktu pinjaman tersebut harus dikembalikan ke kreditor. Jangka waktu pengembalian harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dalam melakukan pinjaman, jangka waktu pengembalian juga harus diperhatikan agar tidak menjadi beban perusahaan sehingga dapat mengganggu aliran kas perusahaan.

3) Biaya yang dikeluarkan

Biaya merupakan komponen produksi yang akan menjadi beban perusahaan dalam penentuan harga jual dan besarnya laba. Dalam melakukan pinjaman modal, ada biaya pinjaman yang harus dikeluarkan seperti biaya bunga, biaya administrasi, biaya komisi dan biaya lainnya. Apabila biaya yang harus dikeluarkan terlalu besar tentu saja hal ini akan meningkatkan biaya

operasional perusahaan dan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

4) Estimasi keuntungan

Estimasi keuntungan diperoleh dari selisih pendapatan dengan biaya pada periode tertentu yang akan datang. Estimasi keuntungan juga harus diperhitungkan dalam melakukan pinjaman modal karena besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh berperan dalam pengembalian dana suatu usaha.

d. Peran Penguatan Modal

Permodalan merupakan unsur yang esensial yang mendukung dalam peningkatan produksi dan pendapatan. Kekurangan permodalan ini sangat membatasi ruang gerak aktivitas usaha termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sementara sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan permodalan tidak mudah untuk diperoleh UMKM. Hal ini membuat semakin sulitnya UMKM untuk mengembangkan kegiatan usaha secara cepat. Untuk itu pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah yang dalam hal ini sebagai fasilitator/pelayanan untuk menciptakan iklim yang kondusif pada pembangunan ekonomi (Nuke Prasetiani, 2007: 130). Salah satu bentuk pelayanan pemerintah Kabupaten Sleman untuk penciptaan iklim yang kondusif bagi UMKM terutama untuk mengatasi masalah permodalan adalah program Dana Penguatan Modal (DPM).

Program DPM merupakan program pinjaman dana bergulir guna menguatkan modal usaha UMKM yang pada umumnya kesulitan mengakses sumber permodalan dari lembaga perbankan.

## 5. Tinjauan Kewirausahaan

### a. Pengertian Kewirausahaan

Coulter dalam Yuyus Suryana dan Kartib Bayu (2013: 24) mengemukakan bahwa kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Suryana mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang (Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, 2013: 24).

Kewirausahaan menurut Peter F. Drucker dalam Kasmir (2006: 12) merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan dalam hal ini usaha (Kasmir, 2006: 12). Kasmir mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan dalam hal

menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan ini memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak (Kasmir, 2006: 14).

b. Motivasi Kewirausahaan

Keputusan seseorang menjadi pengusaha bisa didorong oleh beberapa kondisi dan motivasi. Kondisi tersebut antara lain:

1) *Confidence Modalities*

*Confidence modalities* merupakan seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan dari lahir karena dibesarkan dari keluarga yang sudah memiliki tradisi usaha. Dalam lingkungan ini, seseorang akan belajar dan mendapat rangsangan sosial sejak kecil sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Dengan keluarga yang juga merupakan pengusaha akan menjadikan seseorang mempunyai kecenderungan bersikap dan berperilaku sebagai pengusaha juga.

2) *Tension Modalities*

*Tension modalities* merupakan kondisi yang menekan atau menyudutkan seseorang sehingga tidak ada pilihan lain selain menjadi seorang wirausaha. Tekanan-tekanan tersebut antara lain:

- a) *Marginal-man status*, yaitu kondisi dimana seseorang memiliki status sosial maupun status ekonomi yang tidak jelas dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong seseorang menjadi seorang wirausaha karena wirausaha adalah satu-satunya pilihannya agar bisa hidup layak.
  - b) *Traditional status*, yaitu kondisi jatuhnya kelompok elit seperti pengusaha atau pejabat. Agar memperoleh statusnya kembali dalam masyarakat, maka mereka terjun menjadi pengusaha karena kelompok ini tidak mau bekerja dengan profesi yang bersifat “diperintah”.
  - c) *Skilled technician status*, yaitu kondisi dimana ketrampilan yang dimiliki seseorang menjadi pendorong untuk memilih profesi sebagai pengusaha. Contohnya jika seseorang yang bekerja di industri tekstil sebagai penjahit, maka kemungkinan akan membuka usaha sendiri sebagai penjahit.
- 3) *Emotion Modalities*

*Emotion modalities* merupakan kondisi dimana seseorang itu memang benar-benar menyiapkan diri menjadi pengusaha. Dia tidak berasal dari keluarga pengusaha dan juga memiliki banyak pilihan dalam bekerja selain menjadi pengusaha. Faktor-faktor yang mendorong kondisi ini adalah:

- a) Modal sukses yaitu seseorang yang melihat orang lain (sebagai idola) yang berhasil dengan memilih profesi sebagai pengusaha.
- b) Kultur yaitu kondisi lingkungan tempat tinggal yang menjunjung budaya menjalani profesi pengusaha.
- c) Ideologi yaitu kondisi dimana agama memberikan pengaruh terhadap seseorang sehingga menanamkan sikap dan kepribadian bahwa profesi pengusaha adalah profesi yang mulia.

UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Pengusaha UMKM biasanya disamping memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi juga dituntut memiliki rasa kreativitas dan inovasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi UMKM sendiri yang memiliki beberapa keterbatasan seperti keterbatasan modal dan kemampuan manajerial.

## 6. Tinjauan UMKM

### a. Pengertian UMKM

UMKM memiliki banyak definisi dari berbagai lembaga. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 definisi UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMKM sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang. Kriteria yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut yaitu:

- 1) Usaha mikro memiliki kekayaan bersih (aset) paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan (omset) paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setahun.
- 2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih (aset) lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan (omset) lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) setahun.
- 3) Usaha menengah memiliki kekayaan bersih (aset) lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan (omset) lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) setahun.

BPS memiliki definisi sendiri mengenai UMKM. BPS mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang



bekerja di dalamnya. Usaha mikro adalah usaha produktif yang memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang atau antara 1-4 orang. Usaha kecil adalah usaha produktif yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha produktif yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 10 sampai dengan 99 orang ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh pengertian UMKM adalah kegiatan usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang dengan kekayaan bersih (aset) kurang dari sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan (omset) setahun kurang dari sama dengan Rp150.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

b. Kelebihan dan Kekurangan UMKM

UMKM memiliki ciri-ciri skala usaha kecil, padat karya, berbasis sumber daya lokal dan sumber daya alam, pelaku banyak, dan menyebar (sumber: [www.shvoong.com](http://www.shvoong.com)). Sehingga dari ciri-ciri tersebut dapat diuraikan beberapa kekuatan dan kelemahan UMKM sebagai berikut:

1) Skala usaha kecil

Salah satu karakteristik UMKM adalah skala usahanya yang relatif kecil. Mengacu pada pendapat bahwa salah satu sumber keunggulan adalah melalui *economics of scale*, maka

akan sulit bagi UMKM secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam satu kegiatan bisnis yang sama. UMKM juga memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana dengan hirarki manajerial yang pendek.

2) Padat karya

Meskipun memiliki skala usaha yang relatif kecil, UMKM merupakan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini merupakan konsekuensi UMKM yang tidak banyak menggunakan teknologi tinggi sehingga dalam proses produksi membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga yang bekerja dalam UMKM memberikan dampak kurang efektifnya kegiatan produksi dalam UMKM. Pembagian kerja dalam UMKM juga tidak proporsional dan tenaga kerja sering bekerja diluar batas jam kerja standar. Selain itu, standarisasi produk juga akan sulit tercapai. Maka dari itu, pelatihan-pelatihan manajemen SDM dan manajemen standarisasi produk sangat dibutuhkan UMKM.

3) Berbasis sumber daya lokal dan sumber daya alam

Pada umumnya dalam melakukan kegiatan produksi, pelaku UMKM mengacu pada apa yang bisa diproduksi dengan sumber daya yang ada, daripada memproduksi sesuatu yang diminta oleh pasar. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan produksi UMKM bersifat *production oriented* dan bukan *market*

*oriented*. Dengan sifatnya tersebut, UMKM akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk yang dibuat karena produk yang dibuat bukanlah selera pasar sehingga pangsa pasar yang dimiliki tidak terlalu luas.

4) Pelaku banyak

Pelaku ekonomi UMKM jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pelaku ekonomi UB. Hampir tidak adanya hambatan untuk masuk memudahkan masyarakat masuk ke dalam bisnis UMKM. Pada satu sisi, struktur usaha ini dapat mendorong iklim usaha yang sangat kompetitif akan tetapi di sisi lain, pelaku ekonomi UMKM akan dihadapkan pada kekuatan monopsonis sehingga tingkat *drop-out*nya pun sangat tinggi.

5) Menyebar

Aktivitas bisnis UMKM dapat dijumpai hampir di seluruh pelosok tanah air. Apabila UMKM dapat mengembangkan jaringan bisnis yang efektif, maka UMKM akan mampu menghasilkan produk di mana saja serta kapan saja.

Beberapa kelebihan UMKM jika dibandingkan dengan perusahaan besar antara lain:

- 1) Inovasi dalam teknologi sehingga sangat mudah untuk mengembangkan produk

- 2) Hubungan sosial kemanusiaan antar pengusaha UMKM yang terjalin akrab
  - 3) Kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi
  - 4) Fleksibilitas atau kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang lebih cepat dibandingkan dengan UB yang umumnya birokratis
  - 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan (Tiktik Sartika dan Abdur Rachman, 2002: 13).
- c. Peran UMKM

Peran UMKM sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengembangan UMKM perlu dilakukan karena adanya tiga alasan, yaitu:

- 1) UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan dominan dalam jumlah unit usaha. Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja membuat banyak UMKM juga intensif dalam menggunakan sumber daya lokal. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi lokal.
- 2) UMKM berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi Usaha Besar (UB).

3) Adanya dualisme perekonomian nasional dimana UMKM yang mendominasi dari sisi jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja ternyata dilihat dari sisi pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja UB (Mudrajad Kuncoro, 2010: 187).

d. Permasalahan dalam UMKM

UMKM merupakan sektor usaha yang terbukti berhasil bertahan dalam hantaman krisis global. Akan tetapi untuk mengembangkan diri menjadi perusahaan dengan skala lebih besar, UMKM menghadapi beberapa permasalahan yang sulit dipecahkan tanpa bantuan dari pihak luar. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1) Masalah permodalan

Masalah permodalan merupakan masalah klasik yang ada dalam UMKM. Sebagai usaha kecil, mereka sering mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis yang diminta oleh bank/lembaga keuangan yang lain untuk mendapatkan kredit guna meningkatkan usaha sehingga usaha yang mereka jalani sulit berkembang.

2) Masalah administrasi keuangan

Orientasi keuangan yang tidak profesional menyebabkan UMKM tidak dapat mengatur keuangan secara optimal, profesional dan efisien. Kurangnya pengetahuan dan

ketrampilan ini menyebabkan UMKM sulit menetapkan biaya produksi dan harga pokok serta harga jual yang layak. Ketidaktertiban dalam administrasi keuangan ini juga menyebabkan UMKM kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak bisa memenuhi persyaratan dalam pengajuan modal lembaga perkreditan formal.

3) Masalah kaderisasi

Kaderisasi merupakan masalah krusial yang harus segera dipecahkan UMKM. Generasi penerus yang harusnya ikut membantu menjalankan usaha biasanya lebih memilih bekerja pada perusahaan besar yang lebih menjanjikan.

4) Masalah pengelolaan tunggal

Segala aktivitas di UMKM biasanya dikerjakan sendiri oleh pemilik yang merangkap sebagai manajer usaha. Hal ini menimbulkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan usaha.

5) Lemahnya ketrampilan manajemen

Pelaku UMKM seringkali berangkat berwirausaha dengan bekal sumber daya seadanya. Ketidaksiapan tersebut bukan hanya dalam hal permodalan atau peralatan produksi tetapi juga ketidaksiapan dalam penguasaan kompetensi bidang usaha maupun kecilnya ketrampilan manajemen. Dari penelitian terbukti bahwa kegagalan nomor dua para pelaku UMKM

adalah dikarenakan lemahnya ketrampilan manajemen sehingga kinerja usahanya memburuk (Mulyadi Nitisusastro, 2012: 40).

Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi:

- 1) Belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan
- 2) Permasalahan dalam penyusunan laporan studi kelayakan dan proposal pengajuan pinjaman ke bank. Selain itu, prosedur pinjaman yang berbelit-belit, agunan yang tidak memenuhi dan tingkat bunga yang dinilai terlalu tinggi.
- 3) Penyusunan perencanaan bisnis karena persaingan yang semakin ketat.
- 4) Keterbatasan akses terhadap teknologi
- 5) Persaingan dalam memperoleh bahan baku, harga bahan baku yang terlalu tinggi serta kualitas bahan baku yang masih rendah.
- 6) Peningkatan kualitas barang
- 7) Kesulitan mendapat tenaga kerja yang terampil (Mudrajad Kuncoro, 2010: 196).

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan Regina Sari (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kredit Dana Bergulir Terhadap Tingkat Pendapatan Pengusaha Makanan Olahan Anggota Koperasi KJK PEMK Kebayoran

Lama Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pemberian kredit koperasi dengan tingkat pendapatan pengusaha makanan olahan. Setiap perubahan sebesar 1 rupiah kredit, maka akan menambah pendapatan sebesar 0,485 rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata antara jumlah kredit dengan tingkat pendapatan. Sebesar 22,5% variasi perubahan tingkat pendapatan yang terjadi dapat dijelaskan oleh variasi perubahan jumlah kredit. Sedangkan sisanya 77,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang belum pernah dimasukkan dalam model penelitian ini. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang diteliti sama yaitu mengenai kredit dana bergulir kepada industri kecil dan menengah. Regina meneliti tentang hubungan antara pinjaman dana bergulir terhadap tingkat pendapatan industri. Sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai manfaat dana bergulir tidak hanya terhadap pendapatan usaha. Jenis penelitian juga memiliki persamaan dimana sama-sama merupakan jenis penelitian deskriptif. Meskipun penelitian Regina merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan penelitian penulis merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Liyana Apriyanti (2011) dengan dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Peminjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)”



Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang persepsi anggota KSM terhadap pinjaman bergulir menunjukkan bahwa mereka menganggap jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lama (65,63%) dan bunga pinjaman juga berat (79,69%). Sebanyak 54,76% berpendapat bahwa pinjaman bergulir dapat membantu modal usaha, 52,38% responden berpendapat membantu kelancaran usaha dan 52,38% responden berpendapat bahwa pinjaman dapat meningkatkan usahanya. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa pinjaman bergulir membantu anggota KSM dalam mengembangkan usaha mereka. Dari hasil analisis uji beda memperlihatkan bahwa pendapatan usaha anggota KSM rata-rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 18,41%, tabungan anggota KSM rata-rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 53,91%, sedangkan investasi usaha anggota KSM rata-rata per bulan sesudah program mengalami perubahan yang meningkat sampai 50,26%. Adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa apabila program pinjaman bergulir dilaksanakan secara baik akan dapat memutus lingkaran setan kemiskinan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian yang sama-sama meneliti mengenai kajian program pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan, aset dan tabungan. Selain itu jenis penelitian juga merupakan jenis penelitian deskriptif dan survei. Perbedaan dengan skripsi ini adalah subjek penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifda Zahra Afifah (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Bantuan Modal Dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang”. Penelitian ini merupakan studi kasus pemberian kredit bagi kelompok pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang di Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan modal usaha, omzet penjualan, dan laba dari usaha mikro yang memperoleh kredit. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji pangkat tanda Wilcoxon. Sampel yang dianalisis sebanyak 48 responden yang mendapat kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan laba para pelaku usaha mikro di Kelurahan Pekunden yang dilihat dari perbedaan variabel modal usaha, omzet penjualan, dan laba antara sebelum dan setelah mendapat kredit. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa program perkreditan dari pemerintah melalui pemberian pinjaman modal dapat membantu pengembangan usaha mikro. Persamaan dengan skripsi ini adalah tujuan penelitian yaitu menganalisis perbedaan modal dan pendapatan dari penerima kredit. Perbedaannya terletak pada penganalisisan data.

### **C. Kerangka Pikir**

Agar penelitian ini terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang diharapkan serta berdasarkan kiblat teoritis, maka perlu disusun terlebih dahulu kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji mengenai kebermanfaatan program DPM dari pemerintah Kabupaten Sleman, dimana sasaran akhir dari program DPM adalah peningkatan kinerja UMKM penerima DPM dan perluasan kesempatan kerja di wilayah sekitar tempat usaha UMKM penerima DPM. Dalam penelitian ini akan membandingkan modal, pendapatan usaha, tabungan dan aset usaha sebelum dan sesudah menerima DPM. Apabila terjadi peningkatan berarti penerima program dapat memanfaatkan pinjaman DPM dengan baik, sehingga nantinya setelah keluar dari program akan dapat berusaha sendiri. Bantuan DPM ini berupa pinjaman bergulir yang dapat digunakan sebagai modal bagi kegiatan usaha ekonomi produktif. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan lebih teliti mengenai suatu hal (Sukandarrumidi, 2006: 114). Sedangkan penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengemal atau memperoleh pandangan baru tentang suatu gejala (Sukandarrumidi, 2006: 114). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menggali informasi sejauh mana manfaat program, permasalahan apa yang dihadapi, serta kendala yang dirasakan oleh kelompok penerima pinjaman DPM bidang perindustrian di Kabupaten Sleman berdasarkan hasil dari survei melalui instrumen berupa angket (kuisisioner) dan wawancara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan mendatangi langsung responden dan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan berupa angket kuesioner dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, berupa data kelompok pelaku UMKM khususnya bidang perindustrian penerima DPM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Pengambilan data untuk penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli tahun 2014.

## **C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

### **1. Manfaat dari penerimaan Dana Penguatan Modal**

Manfaat merupakan hal positif yang diperoleh pelaku UMKM yang menerima pinjaman DPM setelah menerima dana pinjaman tersebut. Yang dimaksud dengan pelaku UMKM dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang tercatat dalam data KP3M Kabupaten Sleman. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur manfaat program DPM yaitu:

- a. Peningkatan modal usaha
- b. Peningkatan pendapatan
- c. Pertumbuhan aset
- d. Peningkatan tabungan
- e. Peningkatan jumlah tenaga kerja

### **2. Permasalahan dan kendala**

Permasalahan dan kendala dalam penelitian ini secara operasional didefinisikan sebagai persepsi/penilaian pengusaha UMKM mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan pinjaman DPM baik sebelum menerima DPM, selama menerima DPM maupun setelah menerima DPM.

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM khususnya bidang industri yang menerima pinjaman DPM Kabupaten Sleman selama periode 2010-2013 yang berjumlah 108 usaha.

##### 2. Sampel penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *quota sampling* dalam menentukan sampel penelitian. Sampel yang digunakan adalah penerima DPM periode 2010 sampai dengan 2013 sebanyak 50 pelaku UMKM.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Angket kuisisioner

Menurut Sugiyono (2008: 142), “kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Melalui kuisisioner akan diperoleh data mengenai manfaat yang dirasakan, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM penerima DPM.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bertujuan memperoleh informasi berkaitan dengan penelitian. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat narasumber. Instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai

pemanfaatan Dana Penguatan Modal dan sejauh mana pemanfaatan dana tersebut bagi usaha mereka. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, dengan alasan bahwa peneliti ingin menggali semua informasi dari narasumber sebanyak mungkin.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data sekunder, guna melengkapi data yang diperoleh dari kuisisioner dan wawancara. Data dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip buku, dll. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan meliputi data mengenai perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman dan data pinjaman DPM dari KP3M.

## **F. Instrumen Penelitian**

Angket (kuesioner) yang digunakan adalah angket dengan skala jawaban bertipe-Likert. Menurut Edy Suhardono (2001:62) “pertanyaan tipe ini memungkinkan responden memilih satu dari beberapa derajat perasaan tentang pernyataan yang bergerak dari yang paling menyenangkan atau bernada persetujuan ke yang paling tidak menyenangkan atau bernada ketidaksetujuan”. Instrumen penelitian ini menggunakan skala jawaban bertipe Likert dengan empat skala jawaban yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Adapun pengembangan instrumen penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Sub Variabel	Aspek	No. Pertanyaan
Manfaat penerimaan DPM	Adanya perubahan positif bagi penerima DPM pada perkembangan usaha	F
Bentuk Kemanfaatan DPM terhadap Perkembangan Usaha	a. Peningkatan Modal Usaha b. Peningkatan pendapatan c. Peningkatan aset d. Peningkatan tabungan e. Peningkatan jumlah tenaga kerja	D1-D5
Kendala dan Permasalahan yang Dihadapi	a. Pencairan dana b. Pemanfaatan dana c. Pengembalian dana d. Kendala/permasalahan lainnya	E, F, G, H

### G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, data akan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel persentase. Apabila penelitian yang dilakukan hanya berhenti pada penjelasan masalah dan upaya pemecahan masalah, maka data yang telah disajikan dianalisis dan diberikan makna.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### 1. Deskripsi Obyek Penelitian

###### a. Profil Kabupaten Sleman

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau  $574,82 \text{ Km}^2$  atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Sementara sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan tiga kabupaten/kota yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Sleman mempunyai 17 wilayah kecamatan, yaitu Moyudan, Godean, Minggir, Gamping, Seyegan, Sleman, Ngaglik, Mlati, Tempel, Turi, Prambanan, Kalasan, Berbah, Ngemplak, Pakem, Depok dan Cangkringan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) Kabupaten Sleman telah melaksanakan Program Dana Penguatan Modal (DPM)

guna memperkuat aspek permodalan bagi para pengusaha di Sleman termasuk pelaku usaha UMKM di Sleman. Dalam melaksanakan program DPM, KP3M melakukan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang menangani pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sesuai dengan jenis bidang dana penguatan modal. Bidang UMKM sendiri dibina dan diawasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinas Perindagkop).

b. Profil KP3M Kabupaten Sleman

1) Sejarah KP3M

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pada tahun 2001, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melaksanakan uji Percontohan Otonomi Daerah Tahap Pertama. Beberapa penataan kelembagaan mulai diatur termasuk penetapan kewenangan kelembagaan penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, kewenangan penanaman modal ditangani Subdinas Penanaman Modal dibawah Dinas Perekonomian dengan Kasubdin dijabat oleh Dra. Tri Endah Yitnani.

Pada tahun 2003 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 84 tahun 2000 dan berdasarkan evaluasi kelembagaan maka ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana kewenangan penanaman modal bukan lagi ditangani oleh Subdin Penanaman Modal akan tetapi ditangani oleh Bidang Penanaman Modal di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dengan Kepala Bidang dijabat oleh Dra. Tri Endah Yitnani.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2003 ditemukan beberapa permasalahan antara lain yaitu program penguatan modal yang telah digulirkan menunjukkan peningkatan baik dari sisi jumlah maupun cakupan sasaran sehingga struktur yang ada saat itu tidak memadai dan penanganan investasi/penanaman modal yang dilakukan belum didasarkan pada kajian yang analitis dan belum ditangani oleh struktur yang kapabel.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kajian kelembagaan yang diusulkan untuk peningkatan jumlah dan cakupan sasaran dana penguatan modal perlu diimbangi dengan keberadaan satuan kerja yang bersifat mandiri yaitu Badan Pengelolaan Penguatan dan Penyertaan Modal Daerah, sehingga

pengelolaan akan lebih efektif karena ditangani dalam satu manajemen yang akan mempermudah koordinasi dan pengendaliannya. Untuk kewenangan penanaman modal tetap ditangani Bidang Penanaman Modal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal.

Dalam perkembangannya kebijakan yang diambil adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dimana ketugasan pengelolaan penanaman, penguatan dan penyertaan modal berada di Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal (KP3M) dengan Kepala Kantor dijabat oleh Retno Susiati, S.H, M.M. oleh karena itu, sejak tahun 2010 KP3M resmi menyalurkan DPM dibantu dengan instansi teknis yang terkait.

## 2) Dasar Hukum KP3M

- a) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
- b) Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja.

## 3) Tugas Pokok dan Fungsi KP3M

Tugas Pokok KP3M adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal,

penguatan modal dan penyertaan modal. Sedangkan fungsi KP3M antara lain:

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;
- b) Pelaksanaan tugas bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;
- d) Pembinaan bidang penanaman, penguatan dan penyertaan modal;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

### a. Karakteristik Responden

#### 1) Jenis Kelamin

Berdasarkan perbandingan jenis kelamin, jumlah responden kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Perbandingan responden perempuan dengan laki-laki adalah 27 : 23 atau 54% responden berjenis kelamin perempuan dan 46% berjenis kelamin laki-laki. Berikut ini tabel responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5. Responden Berdasar Jenis Kelamin

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-laki	23	46
Perempuan	27	54
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Sleman sekarang tidak hanya didominasi kaum laki-laki saja. Kaum perempuan juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Hal ini sesuai dengan visi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu kesetaraan gender.

## 2) Rentang Usia

Rentang usia responden berkaitan dengan pengalaman usaha dan motivasi kerja yang dimiliki. Berikut ini data mengenai rentang usia responden:

Tabel 6. Responden Berdasar Rentang Usia

<b>Kelompok Usia</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
kurang dari 41 tahun	17	34
41 - 45 tahun	6	12
46 - 50 tahun	7	14
51 - 55 tahun	11	22
lebih dari 55 tahun	4	8
Tidak menjawab	5	10
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Sebagian besar pelaku usaha berada pada rentang usia muda yaitu kurang dari 41 tahun dengan persentase sebesar 34%.

Secara keseluruhan rata-rata usia responden adalah 45 tahun. Persentase terbesar rentang usia responden berikutnya adalah rentang usia setengah baya yaitu usia 51 – 55 tahun dengan persentase sebesar 22% dan rentang usia paling sedikit adalah rentang usia tua yaitu usia lebih dari 55 tahun dengan persentase 8%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Sleman yang mengakses DPM sebagian besar adalah kelompok usia kurang dari 41 tahun atau kelompok usia muda.

### 3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mencerminkan kemampuan pengusaha dalam menerima ilmu pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Tingkat pendidikan secara tidak langsung juga meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam pergaulan, yang dalam konteks usaha merupakan salah satu celah memperluas jaringan pemasaran dan kemampuan mengakses lembaga keuangan. Data mengenai tingkat pendidikan responden:

Tabel 7. Responden Berdasar Tingkat Pendidikan

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tdk Lulus SD	2	4
SD	1	2
SMP	4	8
SMA/SMK	21	42
Diploma	5	10
S1	15	30
Lainnya	2	4
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)



Tingkat pendidikan pelaku usaha dalam sampel penelitian ini sebagian besar (42%) adalah SMA/K sederajat dan cukup banyak pula (30%) pelaku usaha lulusan S1. Tingkat pendidikan terbanyak berikutnya adalah Diploma (10%), SMP (8%), Tidak lulus SD (4%) dan Lainnya (4%) dan yang paling sedikit adalah lulusan SD (2%). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan responden secara umum cukup baik karena sebagian besar responden berpendidikan SMA/K ke atas. Hanya sekitar 14% responden yang berpendidikan SMP ke bawah. Tingkat pendidikan responden yang sebagian besar berpendidikan menengah ke atas menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kemampuan mengakses jalur permodalan ke lembaga keuangan.

b. Karakteristik Usaha

1) Bidang Usaha

Data mengenai bidang usaha responden tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Karakteristik Usaha Berdasar Bidang Usaha

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. Makanan/Minuman	18	36
2. Fesyen dan Pakaian	9	18
3. Mebel/Furniture	5	10
4. Otomotif	4	8
5. Farmasi	1	2
6. Kerajinan	3	6
7. Industri Bangunan	8	16
8. Industri Daur Ulang	2	4
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Para pelaku usaha sebagian besar (36%) bergerak pada bidang usaha makanan dan minuman diikuti bidang usaha *fesyen* dan pakaian sebesar 18%, industri genteng, batu, pasir dan semen sebesar 16%, mebel dan *furniture* sebesar 10%, otomotif sebesar 8%, kerajinan sebesar 6% dan yang paling sedikit adalah usaha pada bidang farmasi sebesar 2%. Hal ini menggambarkan bahwa usaha yang paling banyak digeluti responden adalah usaha di bidang kuliner. Bidang usaha kuliner memang merupakan bidang usaha yang paling cepat menghasilkan keuntungan sehingga untuk usaha mikro kecil dan menengah merupakan bidang usaha yang pas.

## 2) Lama Usaha

Lama usaha dapat memberikan gambaran pengalaman usaha yang dimiliki untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Data mengenai lama usaha yang dijalankan responden tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Karakteristik Usaha Berdasar Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
0 – 5 tahun	6	12
>5 – 10 tahun	11	22
>10 – 20 tahun	20	40
Lebih dari 20 tahun	11	22
Tidak menjawab	2	4
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Dari tabel di atas dapat diketahui responden telah memiliki pengalaman berwirausaha yang baik karena telah berdiri lebih dari 5 tahun. Bahkan rata-rata lama usaha responden adalah 17 tahun. Hanya sekitar 12,77% saja usaha yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa responden merupakan pengusaha yang telah memiliki pengalaman usaha untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usahanya dan bukan pengusaha yang baru mulai usaha.

### 3) Sumber Modal Awal Usaha

Pada data sumber modal awal ini, responden diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan/opsi sehingga data yang diperoleh pun berjumlah lebih dari 50 data. Berikut ini data mengenai sumber modal awal usaha:

Tabel 10. Karakteristik Usaha Berdasar Sumber Modal Awal

Sumber Modal Awal	Jumlah Responden	Persentase (%)
1. Tabungan pribadi	31	57,41
2. Pinjaman saudara	2	3,70
3. Pinjaman lembaga kredit atau keuangan	21	38,89
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Sumber modal awal usaha sebagian besar (57,41%) berasal dari tabungan pribadi kemudian 37,04% berasal dari pinjaman lembaga kredit/keuangan, 3,70% berasal dari pinjaman saudara dan 1,85% dari sumber lainnya. Meskipun sebagian besar modal awal usaha berasal dari tabungan pribadi, akan tetapi

sumber modal dari lembaga kredit/keuangan juga cukup besar sehingga dapat diindikasikan bahwa sebagian responden tidak memiliki ketakutan mengakses sumber permodalan dari lembaga keuangan/lembaga kredit.

#### 4) Status dan Lokasi Tempat Usaha

Hampir seluruh usaha (66%) dalam penelitian ini memiliki tempat usaha milik sendiri dengan lokasi yang terpisah. Berikut ini data status dan lokasi tempat usaha:

Tabel 11. Karakteristik Usaha Berdasar Status dan Lokasi Tempat Usaha

Status	Lokasi Usaha			
	Menyatu		Terpisah	
	Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
Milik Sendiri	33	66	13	26
Sewa	1	2	3	6
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>68</b>	<b>16</b>	<b>32</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Sebagian responden yakni 26% responden memiliki status tempat usaha milik sendiri dengan lokasi usaha yang terpisah. Sedangkan 6% responden memiliki status tempat usaha sewa dengan lokasi usaha yang terpisah. Selain itu, sebanyak 2% responden memiliki status tempat usaha sewa dengan lokasi usaha yang menyatu dengan tempat tinggal.

#### 5) Alasan Awal Mendirikan Usaha

Pada pertanyaan mengenai alasan awal mendirikan usaha ini, responden diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan sehingga jumlah data yang diperoleh lebih dari 50 data. Sekitar

30,88% responden menjawab bahwa alasan awal mereka mendirikan usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, 26,47% responden menjawab memiliki ketrampilan/hobi dalam bidang usaha yang digeluti, 23,53% menjawab melihat peluang pasar, 14,71% menjawab meneruskan usaha keluarga dan hanya 2,94% yang menjawab untuk mengisi waktu luang serta hanya 1,47% responden yang menjawab coba-coba. Berikut ini data karakteristik responden berdasar alasan awal mendirikan usaha:

Tabel 12. Karakteristik Usaha Berdasar Alasan Awal Usaha

<b>Alasan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
1. Coba-coba	1	1,47
2. Mengisi waktu luang	2	2,94
3. Meneruskan usaha keluarga	10	14,71
4. Memiliki ketrampilan/hobi dalam usaha	18	26,47
5. Memenuhi Kebutuhan Hidup	21	30,88
6. Melihat Peluang Pasar	16	23,53
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Besarnya responden yang memilih mendirikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup memberikan gambaran bahwa responden menggantungkan hidup mereka dari usaha yang mereka jalani sehingga mereka akan bersungguh-sungguh dalam mengurus usaha mereka.

#### 6) Jumlah Tenaga Kerja

BPS mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Berikut ini data mengenai jumlah tenaga kerja yang dimiliki para responden:

Tabel 13. Karakteristik Usaha Berdasar Jumlah Tenaga Kerja

<b>Jumlah TK</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
1 s/d 4 orang	28	56
5 s/d 9 orang	9	18
10 s/d 49 orang	7	15
50 s/d 99 orang	1	2
Tidak menjawab	5	10
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Mayoritas para responden memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang. Berdasarkan jumlah tenaga kerja tersebut, maka sebagian besar usaha yang diteliti dalam studi ini termasuk dalam klasifikasi usaha mikro (berdasarkan klasifikasi BPS).

#### 7) Aset dan Omset Usaha

Dengan melihat jumlah aset dan omset tahunan yang dimiliki dapat dikategorikan skala dari usaha tersebut. Berikut ini data aset usaha yang dimiliki responden:

Tabel 14. Karakteristik Usaha Berdasar Aset Usaha

<b>Besar Aset</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kurang dari 5 juta	21	42
5 juta s/d 50 juta	13	26
Lebih dari 50 juta s/d 100 juta	6	12
Lebih dri 100 juta s/d 150 juta	2	4
Lebih dari 150 juta	8	16
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Sebanyak 42% responden memiliki nilai aset berkisar antara lima juta sampai dengan 50 juta. Sebanyak 4% responden memiliki aset kurang dari 5 juta dimiliki 4% responden saja. Nilai aset usaha yang dimiliki sebagian besar responden yang kurang dari 50 juta menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pelaku usaha mikro (berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008). Sementara itu data omset usaha yang dimiliki para responden adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Karakteristik Usaha Berdasar Omset Usaha

<b>Besar Omset Per Tahun</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kurang dari 300 juta	35	70
Lebih dari 300 juta s/d 2,5 miliar	12	24
Lebih dari 2,5 miliar s/d 50 miliar	3	6
Lebih dari 50 miliar	0	0
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Sebanyak 70% responden memiliki omset per tahun kurang dari 300 juta. Sedangkan 24% responden memiliki omset per tahun lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Berdasarkan besarnya omset usaha per tahun yang kurang dari 300 juta per tahun maka sebagian besar responden merupakan pelaku usaha mikro (berdasarkan UU No. 20 tahun 2008).

c. Karakteristik DPM

1) Besar Pinjaman DPM

Rata-rata besar pinjaman dana penguatan modal yang disalurkan pada periode penelitian adalah Rp39.240.000,00. Berikut ini data pinjaman DPM.

Tabel 16. Besarnya Pinjaman

Pinjaman terendah	Rp 10.000.000,00
Modus	Rp 40.000.000,00
Rata-Rata	Rp 39.240.000,00
Pinjaman tertinggi	Rp 100.000.000,00

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Pinjaman yang disalurkan berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Besaran pinjaman yang paling banyak disalurkan adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dilihat dari besarnya pinjaman yang paling banyak disalurkan maka sasaran DPM adalah usaha berskala mikro.

2) Penggunaan Pinjaman DPM

Pada pertanyaan ini, responden diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan sehingga data yang diperoleh lebih dari 50 data.

Tabel 17. Penggunaan Pinjaman DPM

Penggunaan DPM	Jumlah Responden	Persentase (%)
Menambah Modal	44	69,84
Membeli Asset	19	30,16
Lain-lain	0	0,00
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)



Pinjaman DPM banyak dimanfaatkan responden untuk menambah modal disamping untuk membeli aset. Sebanyak 69,84% responden menyatakan menggunakan DPM untuk menambah modal usaha dan 30,16% responden menggunakannya untuk membeli aset.

### 3) Besarnya Angsuran

DPM merupakan pinjaman dana bergulir sehingga penerima DPM wajib mengembalikan dana dengan cara diangsur. Berikut ini tersaji data besarnya angsuran DPM.

Tabel 18. Besar Angsuran Tiap Bulan

Angsuran Terendah	175.000
Modus	1.650.000
Rata-rata	1.903.200
Angsuran Tertinggi	5.500.000

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Rata-rata besarnya angsuran yang dibayarkan responden per bulan adalah Rp1.903.200,00. Angsuran terendah tiap bulan yang dibayarkan adalah Rp175.000,00 dan angsuran tertinggi adalah Rp5.550.000,00 per bulan. Sedangkan besaran angsuran terbanyak adalah Rp1.650.000,00 per bulan.

Mengenai besarnya angsuran, sebagian besar responden tepatnya 78% responden menganggap angsuran sudah sesuai dengan kemampuan. Bahkan 22% responden menyatakan bahwa angsuran yang mereka lakukan termasuk angsuran yang ringan. Tidak ada satu responden dalam penelitian ini yang menganggap

angsuran yang mereka lakukan berat. Data persepsi responden mengenai besarnya angsuran dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Persepsi Responden Mengenai Besarnya Angsuran

<b>Besar Angsuran</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ringan	11	22
Sesuai Kemampuan	39	78
Berat	0	0
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Data tersebut memberikan gambaran bahwa responden tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur pinjaman. Besarnya angsuran yang telah ditetapkan KP3M sudah sesuai kemampuan responden bahkan masuk kategori angsuran yang ringan. Selain itu, data ini mengindikasikan bahwa DPM yang disalurkan tidak memberatkan para peminjam dana.

#### 4) Persepsi Besarnya Kontribusi

DPM merupakan dana bergulir yang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti lembaga perkreditan yang tujuan utamanya mencari keuntungan dari bunga pinjaman, DPM lebih fokus pada pengembangan usaha masyarakat meskipun DPM juga membebankan bunga. Dalam penyaluran DPM, bunga digunakan bukan untuk mencari keuntungan akan tetapi bunga digunakan sebagai bentuk pengikat dan motivasi kepada para pengguna DPM agar tertib dan patuh dalam mengembalikan pinjaman. Sehingga, bunga yang dibebankan pun sangat kecil yaitu hanya 0,5% per bulan. Istilah

penggunaan kata “bunga” pun diganti dengan istilah “kontribusi”.

Berikut ini data mengenai persepsi besarnya kontribusi.

Tabel 20. Persepsi Besarnya Kontribusi

<b>Besarnya Kontribusi</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tinggi	6	12
Rendah	44	88
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Sebagian besar responden yaitu 88% menyatakan bahwa kontribusi yang mereka bayar merupakan kontribusi yang tergolong rendah bila dibandingkan dengan bunga yang terdapat dalam lembaga perkreditan. Hanya 12% responden yang menyatakan bahwa kontribusi yang mereka bayar terlalu tinggi. Beberapa responden yang menyatakan bahwa kontribusi yang mereka bayarkan terlalu tinggi mengharapkan agar DPM yang disalurkan tidak dibebankan kontribusi sama sekali.

#### 5) Sumber Pemerolehan Informasi DPM

Pada pertanyaan ini, responden diperbolehkan memilih lebih dari satu jawaban sehingga data yang diperoleh pun berjumlah lebih dari 50. Dalam mengakses informasi mengenai DPM, sebagian responden yaitu 47,06% menyatakan berasal dari staff KP3M sendiri.

Sekitar 41,18% responden memperoleh informasi mengenai DPM berasal dari teman/tetangga. Sedangkan responden yang memperoleh informasi berasal dari media massa

hanya 5,88% responden yang menyatakan mengaksesnya. Selebaran dari KP3M juga hanya diakses sebanyak 3,92% responden. sisanya (1,96%) menjawab lainnya. Sumber lainnya yang dimaksud responden adalah sumber informasi dari kelompok KKN UMY. Berikut ini data mengenai sumber informasi DPM:

Tabel 21. Sumber Informasi DPM

<b>Sumber Informasi DPM</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Teman/tetangga	21	41,18
Staff KP3M	24	47,06
Leaflet/selebaran dari KP3M	2	3,92
Pengumuman di media masa	3	5,88
Lainnya	1	1,96
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Berdasarkan data tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa staff KP3M sudah cukup baik dalam menginformasikan mengenai DPM akan tetapi karena masih banyak pula responden yang menyatakan memperoleh informasi dari teman/tetangga maka akan lebih baik lagi jika informasi mengenai DPM juga diumumkan secara formal yaitu melalui media massa maupun selebaran/leaflet.

#### 6) Ketepatan Waktu Pembayaran

Dalam melakukan pembayaran, ada beberapa responden yang tidak tepat waktu. Data mengenai ketepatan waktu pembayaran tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 22. Ketepatan Waktu Pembayaran

<b>Pembayaran Angsuran</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tepat Waktu	37	74
Tidak Tepat Waktu	13	26
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Dari data tersebut dapat dilihat 74% responden membayar angsuran tepat waktu, akan tetapi 26% responden menyatakan masih tidak bisa tepat waktu dalam membayar angsuran. Alasan para responden tidak tepat waktu membayar angsuran salah satunya adalah omset usaha yang sedang mengalami penurunan.

#### 7) Pengeluaran Lain yang Mengganggu DPM

Beberapa responden menggunakan DPM untuk pengeluaran yang tidak produktif. Berikut ini data responden yang menggunakan DPM untuk kebutuhan tidak produktif:

Tabel 23. Gangguan Pemanfaatan DPM

<b>Pengeluaran Lain</b>	<b>Laki-laki</b>		<b>Perempuan</b>		<b>Total</b>	
	<b>Jmlh.</b>	<b>%</b>	<b>Jmlh.</b>	<b>%</b>	<b>Jmlh.</b>	<b>%</b>
Tidak	14	60,87	14	51,85	28	56
Ada	9	39,13	13	48,15	22	44
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Dari data di atas sebanyak 28% responden tidak menggunakan DPM untuk pengeluaran lain. Akan tetapi 22% responden menggunakan DPM untuk pengeluaran yang tidak produktif. Sebanyak 60,87% responden laki-laki tidak menggunakan DPM untuk pengeluaran lain. Untuk responden perempuan yang tidak menggunakan DPM untuk pengeluaran

lain ada sebanyak 51,85%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki lebih banyak menggunakan DPM untuk pengeluaran lain daripada responden perempuan. Untuk jenis pengeluaran yang mengganggu DPM dapat dilihat dari data di bawah ini:

Tabel 24. Jenis Gangguan Pemanfaatan DPM

No.	Gangguan Angsuran	Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jmlh.	%	Jmlh.	%	Jmlh.	%
1	Biaya Sekolah	6	40,00	5	22,73	11	29,73
2	Biaya Berobat	3	20,00	1	4,55	4	10,81
3	Konsumsi	3	20,00	4	18,18	7	18,92
4	Keb. Sosial	2	13,33	8	36,36	10	27,03
5	Utang	1	6,67	4	18,18	5	13,51
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>37</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Dari data di atas, sebanyak 29,73% responden menggunakan sebagian DPM untuk membayar biaya sekolah, 27,03% responden menggunakan sebagian DPM untuk kebutuhan sosial seperti untuk membantu saudara, 18,92% responden menggunakan sebagian DPM untuk konsumsi sehari-hari, 13,52% responden menggunakan sebagian DPM untuk membayar utang dan 10,81% responden menggunakan sebagian DPM untuk biaya berobat. Responden perempuan memiliki kecenderungan menggunakan DPM untuk kebutuhan sosial sedangkan responden laki-laki lebih sering menggunakan DPM untuk membayar biaya sekolah anak.

## 8) Pelaksanaan Survei, Verifikasi dan Pemantauan

Dalam pedoman penyaluran DPM, penerima DPM selain menerima hak untuk mendapatkan DPM sesuai dengan hasil kelayakan usaha yang telah ditentukan oleh tim pengelola, juga mendapatkan hak untuk memperoleh pembinaan, pendampingan dan pemantauan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindagkop atau dari KP3M Kabupaten Sleman. Berikut ini data mengenai pelaksanaan survei, verifikasi dan pemantauan usaha penerima DPM Kabupaten Sleman.

Tabel 25. Pelaksanaan Survei, Verifikasi Dan Pemantauan

Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah		Total	Persentase (%)		Total
	Ya	Tdk		Ya	Tdk	
Survey oleh dinas terkait	43	7	50	86	14	100
Verifikasi hasil survey	37	13	50	74	26	100
Pemantauan usaha	25	25	50	50	50	100

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden yaitu 86% responden sudah disurvei oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Perindagkop. Akan tetapi sisanya yaitu 14% responden merasa belum pernah disurvei kelayakan usaha oleh dinas tersebut. Verifikasi hasil survei juga terbukti sudah dilakukan pada sebagian besar usaha. Hanya 26% UMKM yang belum diverifikasi hasil survei dari KP3M. Sementara itu, dalam hal pemantauan usaha 50% responden mengatakan bahwa usaha mereka dipantau secara kontiu oleh petugas akan tetapi 50%

responden mengatakan petugas tidak melakukan pemantauan usaha.

9) Bentuk layanan dari KP3M selain berbentuk DPM

Selain pemberian DPM, KP3M memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan usaha bagi UMKM yang membutuhkan. Berikut ini tersaji data mengenai pelayanan dari KP3M selain berbentuk DPM.

Tabel 26. Layanan Lain dari KP3M selain DPM

Layanan selain DPM	Jumlah	Persentase (%)
Ya	10	20
Tidak	40	80
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden tidak memperoleh layanan dari KP3M selain DPM. Hanya 20% responden yang memperoleh layanan selain DPM dari KP3M. Sedangkan bentuk layanan dari KP3M antara lain:

Tabel 27. Bentuk Layanan Selain DPM

Bentuk Layanan	Jumlah	Persentase (%)
Konsultasi Usaha	2	20
Manajemen Usaha	5	50
Bantuan Pemasaran	1	10
Pendampingan Usaha	2	20
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer diolah (2014)

Layanan yang paling banyak didapatkan adalah manajemen usaha sebanyak 50% responden. 20% responden memperoleh konsultasi usaha dan 20% lainnya juga memperoleh



pendampingan usaha. Bantuan pemasaran diperoleh 10% responden.

### 3. Deskripsi Hasil Penelitian

#### a. Kemanfaatan DPM

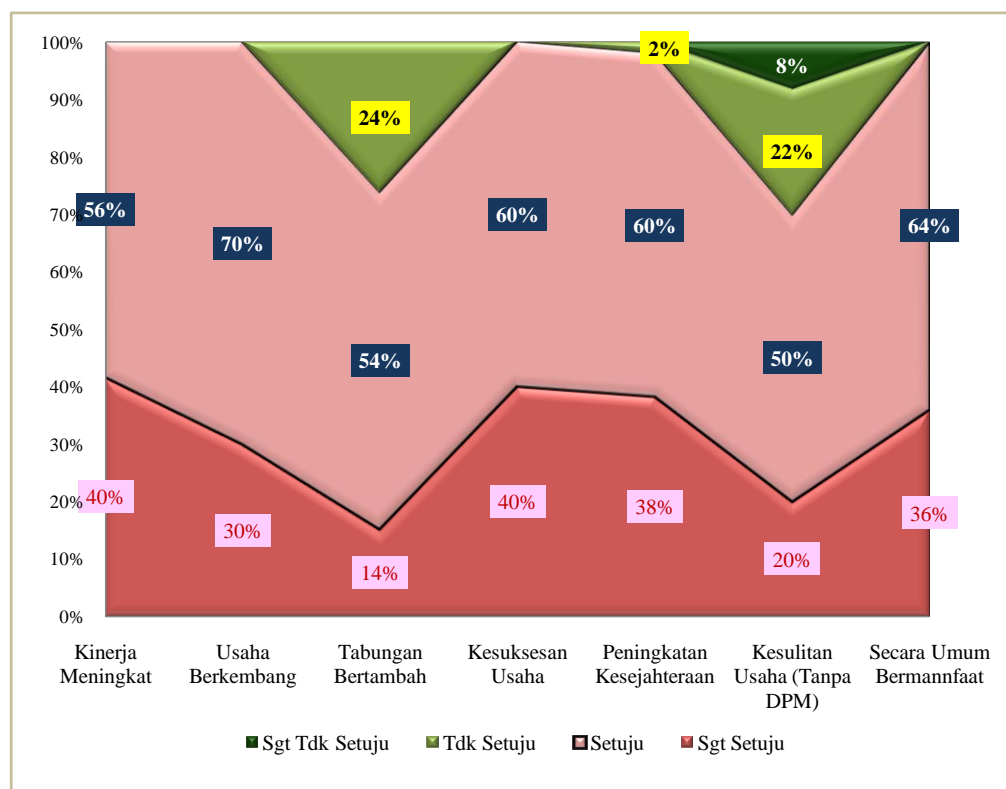
Penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif persentase hasil penelitian setiap variabel yang menunjukkan kemanfaatan DPM. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner. Data mengenai kemanfaatan DPM diperoleh melalui angket yang berisi beberapa butir pernyataan. Responden memilih empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju(TS), sangat tidak setuju (STS) dengan pernyataan tersebut.

Berdasarkan data penelitian pada Tabel 27 dan Gambar 3 di bawah ini dapat digambarkan secara umum DPM bermanfaat bagi seluruh penerima DPM. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pernyataan bahwa setelah menerima DPM seluruh kinerja UMKM meningkat, seluruh UMKM mengalami perkembangan, sebagian besar tabungan yang dimiliki pelaku UMKM bertambah, adanya kesuksesan usaha pelaku UMKM, sebagian besar pelaku UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka dan tanpa adanya DPM, 70% responden akan mengalami kesulitan menjalankan usaha.

Tabel 28. Data Kemanfaatan DPM

No	Pernyataan	SS		S		TS		STS		Tdk. Mnjwb	
		J	%	J	%	J	%	J	%	J	%
1	Pinjaman DPM meningkatkan kinerja usaha saya	20	40	28	56	-	-	-	-	2	4
2	Usaha saya mengalami perkembangan semenjak menerima pinjaman DPM	15	30	35	70	-	-	-	-	-	-
3	Tabungan saya bertambah sebagai hasil pinjaman DPM yang diperoleh	7	14	27	54	12	24	-	-	4	8
4	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu kesuksesan usaha saya	20	40	30	60	-	-	-	-	-	-
5	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu peningkatan kesejahteraan keluarga saya	19	38	30	60	1	2	-	-	-	-
6	Bila KP3M tidak memberikan DPM maka saya akan kesulitan menjalankan usaha saya	10	20	25	50	11	22	4	8	-	-
7	Secara umum pinjaman DPM bermanfaat untuk saya	18	36	32	64	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Primer diolah (2014)



Gambar 3. Kemanfaatan DPM

Berikut ini deskripsi secara lengkap masing-masing item pernyataan:

- 1) Sebagian besar responden yaitu 56% responden mengatakan pinjaman DPM meningkatkan kinerja usaha mereka, bahkan 40% mengatakan pinjaman DPM yang diberikan sangat meningkatkan kinerja usaha mereka. Sisanya 4% responden memilih untuk tidak memberikan pernyataan. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan bahwa pinjaman DPM yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sleman kepada para pelaku UMKM dapat meningkatkan kinerja usaha yang mereka kelola.
- 2) Sebagian responden yaitu 70% responden mengatakan bahwa usaha mereka berkembang sejak menerima pinjaman DPM. Bahkan 30% responden lainnya mengatakan bahwa usaha mereka

sangat berkembang sejak menerima DPM. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden menyatakan usaha para pelaku UMKM penerima DPM berkembang dan sangat berkembang sejak menerima DPM.

- 3) Sebagian besar responden yaitu 54% responden mengatakan bahwa tabungan mereka bertambah sebagai hasil pinjaman DPM yang mereka peroleh. Bahkan sebanyak 14% responden mengatakan tabungan mereka sangat bertambah sebagai hasil pinjaman DPM yang mereka peroleh. Akan tetapi sebanyak 24% responden mengatakan bahwa tabungan mereka tidak bertambah sebagai hasil pinjaman DPM. Setelah dilakukan konfirmasi, responden yang menyatakan tabungan mereka tidak bertambah sebagai hasil pinjaman DPM mengatakan bahwa pinjaman DPM yang mereka peroleh tidak mereka simpan/tabung akan tetapi langsung diputar kembali sebagai modal kerja untuk usaha yang mereka jalankan. Dan sisanya 8% responden memilih untuk tidak menjawab.
- 4) Sebanyak 60% responden mengatakan pinjaman DPM telah berperan/membantu kesuksesan usaha yang mereka kelola. Bahkan sisanya yaitu 40% responden mengatakan pinjaman DPM telah sangat berperan/membantu kesuksesan usaha mereka.
- 5) Sekitar 60% responden mengatakan pinjaman DPM membantu peningkatan kesejahteraan keluarga responden. Bahkan 38%

responden menyatakan pinjaman DPM sangat membantu peningkatan kesejahteraan keluarga responden. Hanya ada 2% responden yang menyatakan pinjaman DPM tidak membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

- 6) Sebagian responden yaitu 50% responden menyatakan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha apabila tidak didukung DPM. Bahkan 20% responden mengaku akan sangat kesulitan menjalankan usaha tanpa DPM. Meski demikian, 22% responden mengaku tidak akan kesulitan dalam menjalankan usaha tanpa DPM dan 8% responden sangat tidak akan mengalami kesulitan menjalankan usaha tanpa dukungan DPM. Hal ini diduga karena sebagian pelaku usaha sudah mampu mengakses sumber permodalan dari lembaga keuangan/perkreditan. Selain alasan tersebut, dugaan lain adalah karena sebagian usaha yang dimiliki responden sudah berdiri cukup lama dan sudah masuk kategori usaha mapan sehingga tanpa bantuan permodalan dari pemerintah, mereka sudah mampu berdiri sendiri.
- 7) Sebanyak 64% responden mengatakan secara umum pinjaman DPM bermanfaat untuk mereka. Sisanya yaitu 36% mengatakan secara umum pinjaman DPM sangat bermanfaat untuk mereka.

b. Bentuk Kemanfaatan DPM

Bentuk kemanfaatan DPM dapat dilihat dari lima data yaitu besar modal, jumlah tenaga kerja, pendapatan, aset dan tabungan. Dengan membandingkan kelima data sebelum dengan sesudah menerima pinjaman DPM dapat diketahui bentuk kemanfaatan dari pinjaman DPM.

Berikut ini data rata-rata kenaikan kelima indikator setelah menerima DPM:

Tabel 29. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menerima DPM

No	Indikator	Rata-rata			
		Sebelum	Setelah	Pertambahan (Angka)	(%)
1	Modal Usaha	Rp70.425.532	Rp102.117.021	Rp31.691.489	45,00
2	Tenaga Kerja	7 orang	8 orang	1 orang	11,90
3	Pendapatan	Rp7.675.000	Rp10.313.551	Rp2.638.551	34,38
4	Nilai Aset	Rp229.773.810	Rp272.404.762	Rp42.630.952	18,55
5	Tabungan	Rp21.214.286	Rp32.904.762	Rp11.690.476	55,11

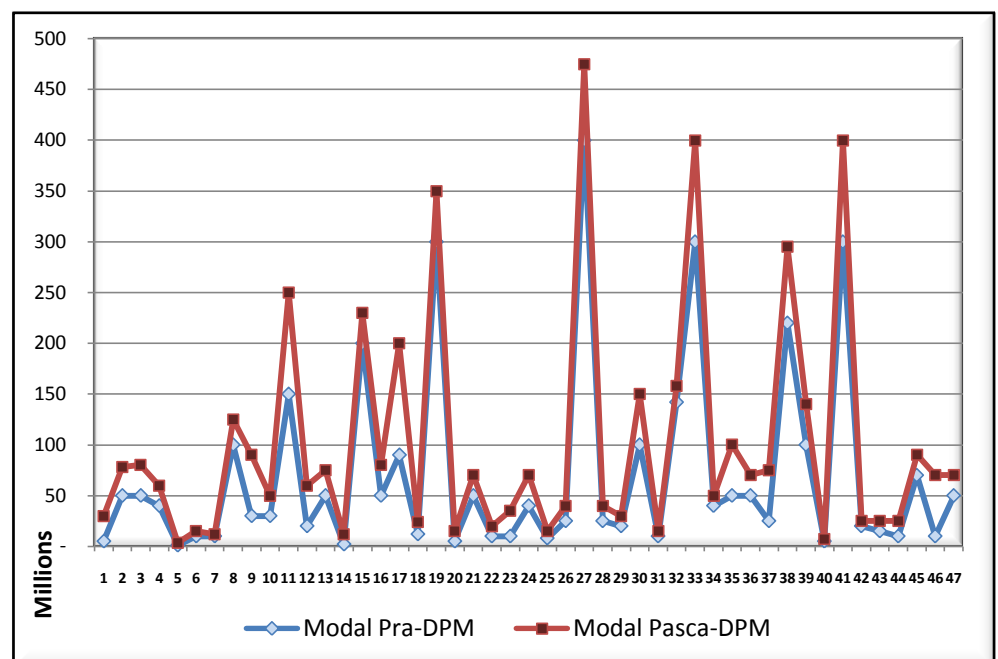
Sumber: Data Primer diolah (2014)

Berdasarkan data tersebut, tabungan merupakan indikator yang memiliki rata-rata kenaikan paling tinggi bila dibandingkan dengan indikator lainnya. Tabungan para responden setelah menerima DPM rata-rata meningkat 55,11% dari tabungan sebelum menerima DPM. Indikator berikutnya adalah modal usaha dimana modal usaha para responden rata-rata meningkat 45% setelah menerima DPM. Untuk indikator pendapatan usaha meningkat 34,38% dari pendapatan sebelum menerima DPM. Indikator yang selanjutnya adalah nilai aset usaha yang rata-rata meningkat 18,55% setelah menerima DPM. Dan

indikator yang paling sedikit mengalami kenaikan adalah indikator jumlah tenaga kerja yang hanya meningkat 11,90%. Berikut ini penjelasan dari masing-masing indikator secara lebih rinci:

#### 1) Besar Modal

Sebanyak 47 responden memberikan data mengenai jumlah modal yang mereka miliki sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Tiga responden tidak memberikan data yang memadai untuk diolah sehingga tidak dapat ikut disajikan. Perbandingan modal usaha sebelum dan setelah DPM dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Gambar 4. Perbandingan Modal Sebelum dan Setelah DPM

Gambar di atas adalah grafik perbandingan modal usaha sebelum dan setelah menerima DPM. Garis biru menandakan besarnya modal sebelum menerima DPM dan garis merah

menandakan besarnya modal setelah menerima DPM. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa letak keseluruhan garis merah berada di atas garis biru. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah modal setelah menerima DPM lebih besar daripada jumlah modal sebelum menerima DPM.

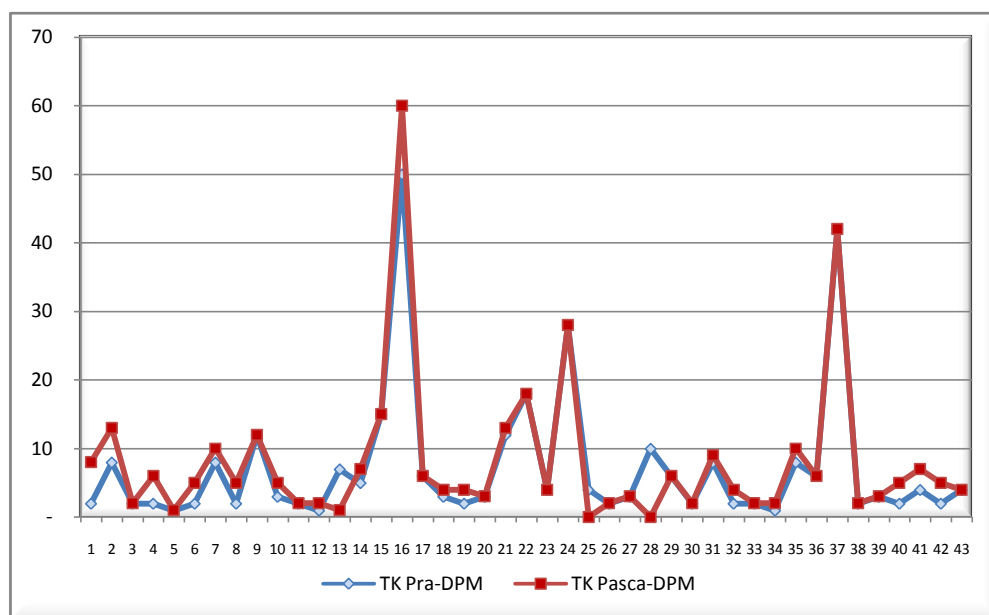
Rata-rata jumlah modal UMKM sebelum menerima DPM adalah Rp70.425.532,00. Sedangkan rata-rata jumlah modal UMKM setelah menerima DPM adalah Rp102.117.021,00. Pertumbuhan modal yang paling kecil hanya 11,27% sedangkan pertumbuhan modal yang paling besar mencapai 600% atau 6 kali lipat dari lebih besar dari modal sebelumnya. Mayoritas setelah menerima DPM, modal UMKM tumbuh 50% lebih besar dibandingkan dengan modal sebelum menerima DPM. Rata-rata pertumbuhan modal adalah 45%. Sebelum menerima DPM, modal terendah yang dimiliki UMKM Rp1.000.000,00 sedangkan modal tertinggi mencapai Rp400.000.000,00. Setelah menerima DPM, jumlah modal yang dimiliki para pelaku UMKM mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah modal yang mereka miliki sebelum menerima DPM. Jumlah modal terendah yang dimiliki UMKM setelah menerima DPM adalah Rp3.500.000,00 sedangkan modal tertinggi adalah Rp475.000.000,00. Kenaikan modal tertinggi mencapai



Rp110.000.000,00 sedangkan kenaikan modal terendah adalah Rp2.000.000,00.

## 2) Jumlah Tenaga Kerja

Sebanyak 43 responden memberikan data mengenai jumlah modal yang mereka miliki sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Tujuh responden tidak memberikan data yang memadai untuk diolah sehingga tidak dapat ikut disajikan. Perbandingan jumlah tenaga kerja sebelum dan setelah DPM dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Gambar 5. Perbandingan Tenaga Kerja Sebelum dan Setelah DPM

Gambar di atas adalah grafik perbandingan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebelum dan setelah menerima DPM. Garis biru menandakan jumlah tenaga kerja sebelum menerima DPM dan garis merah menandakan jumlah tenaga kerja setelah menerima DPM. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa hampir

semua garis merah terletak di atas garis biru. Hanya ada beberapa garis merah yang berada di bawah garis biru. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas jumlah tenaga kerja setelah menerima DPM lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja sebelum menerima DPM.

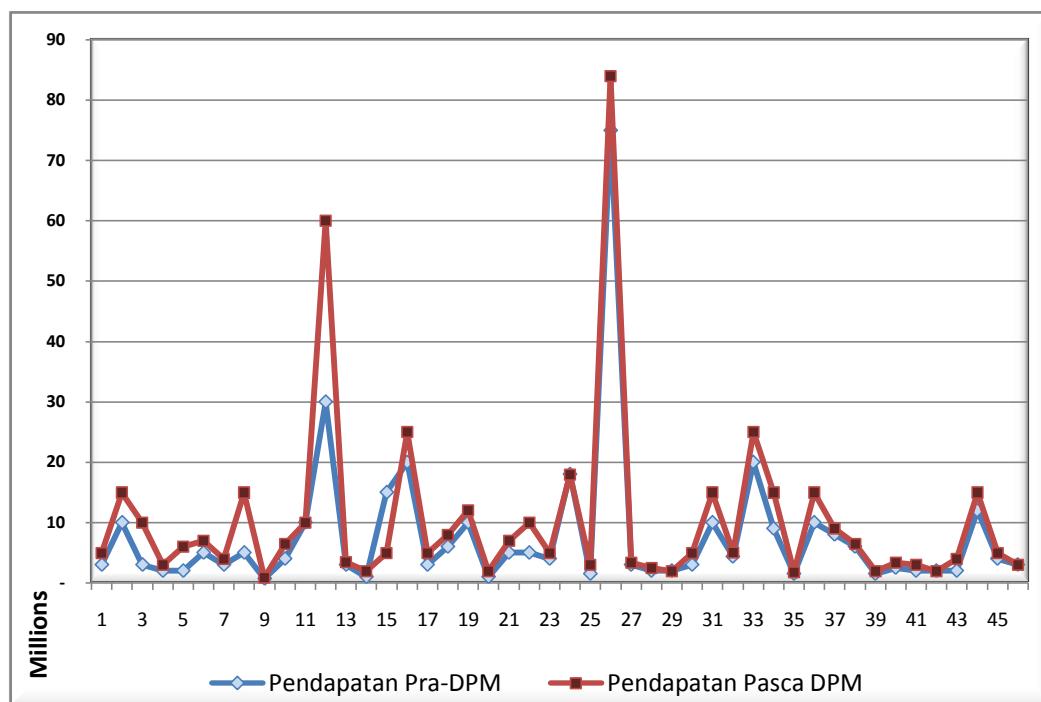
Sebagian besar yaitu 46,51% atau 20 pelaku UMKM dapat menambah jumlah tenaga kerja setelah menerima DPM. Peningkatan jumlah tenaga kerja berkisar antara 8,33% sampai 300% atau dalam frekuensi berkisar antara 1 sampai 10 tenaga kerja. Meskipun demikian, sebagian pelaku UMKM yaitu sebesar 46,51% atau 20 pelaku UMKM masih memiliki tenaga kerja yang sama jumlahnya setelah menerima DPM bahkan beberapa pelaku UMKM yaitu 6,98% atau tiga pelaku UMKM mengalami penurunan jumlah tenaga yang bekerja dalam usahanya. Penurunan jumlah tenaga kerja setelah menerima DPM cukup besar yakni 85% sampai 100%. Setelah dilakukan konfirmasi, diperoleh informasi bahwa penurunan jumlah tenaga kerja terjadi karena adanya bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi.

Secara keseluruhan, rata-rata tenaga kerja yang dimiliki UMKM sebelum menerima DPM berjumlah 7 orang. Setelah menerima DPM, jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM meningkat, walaupun peningkatan yang terjadi secara frekuensi bukan merupakan peningkatan yang signifikan. Rata-rata jumlah

tenaga kerja yang bekerja di UMKM setelah menerima pinjaman DPM menjadi 8 orang. Rata-rata peningkatan jumlah tenaga kerja di UMKM meningkat 11,90% atau meningkat 1 orang setelah menerima DPM.

### 3) Pendapatan

Sebanyak 46 responden memberikan data mengenai besarnya pendapatan yang mereka peroleh sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Empat responden tidak bersedia memberikan data yang memadai untuk diolah sehingga tidak dapat ikut disajikan. Perbandingan modal usaha sebelum dan setelah DPM dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Gambar 6. Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Setelah DPM

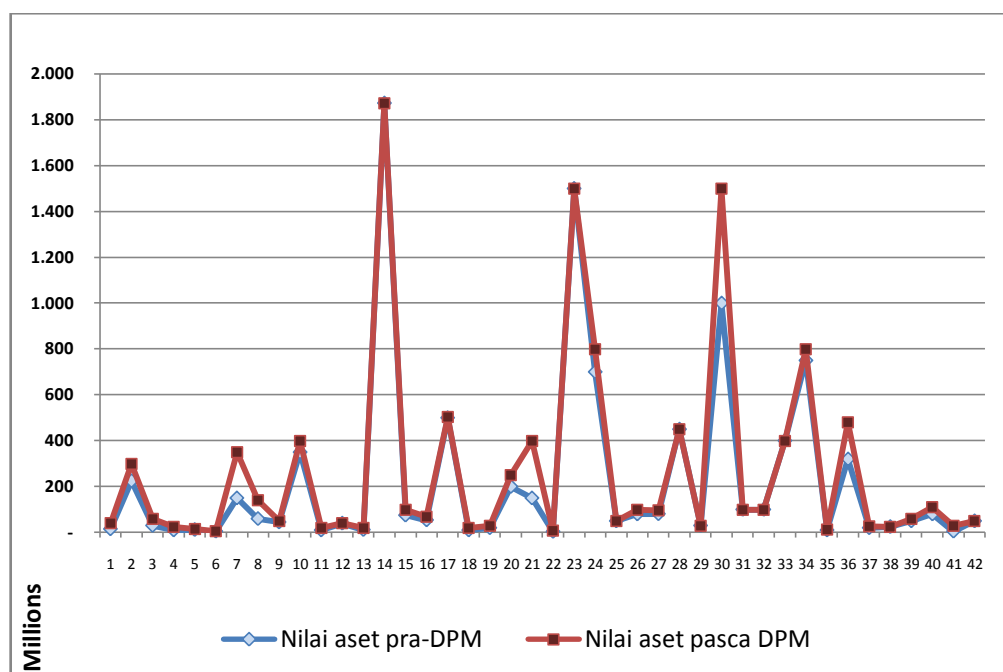
Garis biru menandakan besarnya pendapatan usaha sebelum menerima DPM dan garis merah menandakan besarnya pendapatan usaha setelah menerima DPM. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa hampir seluruh responden yakni 86,95% atau 40 pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan usaha setelah menerima DPM. Kenaikan pendapatan usaha berkisar antara 8,33% sampai mencapai 233,33%. Beberapa responden yakni 10,86% atau lima pelaku UMKM memiliki pendapatan yang sama besar setelah menerima DPM. Hanya satu UMKM yang menurun pendapatannya setelah menerima DPM. Setelah dikonfirmasi, pelaku UMKM ini memang sedang mengalami penurunan kinerja usaha. Hal ini dipicu permasalahan pemasaran. Penurunan pendapatan usaha pelaku UMKM ini mencapai 66,66%.

Secara keseluruhan, rata-rata pendapatan usaha per bulan para responden sebelum menerima DPM hanya sekitar Rp7.675.000,00. Setelah menerima DPM, rata-rata pendapatan usaha per bulan meningkat menjadi Rp10.313.551,00. Pendapatan usaha per bulan ini rata-rata mengalami peningkatan 34,38% atau meningkat Rp2.638.551,00 dari pendapatan usaha sebelum menerima DPM. Pendapatan para pelaku UMKM sebelum menerima DPM berkisar antara Rp700.000,00/bulan sampai dengan Rp75.000.000,00/bulan. Sedangkan pendapatan setelah

menerima DPM berkisar antara Rp900.000,00/bulan sampai dengan Rp84.000.000,00/bulan.

#### 4) Nilai aset

Sebanyak 42 responden memberikan data mengenai besarnya pendapatan yang mereka peroleh sebelum menerima DPM dan setelah menerima DPM. Delapan responden tidak bersedia memberikan data yang memadai untuk diolah sehingga tidak dapat ikut disajikan. Perbandingan nilai aset usaha sebelum dan setelah DPM dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Gambar 7. Perbandingan Nilai Aset Sebelum dan Setelah DPM

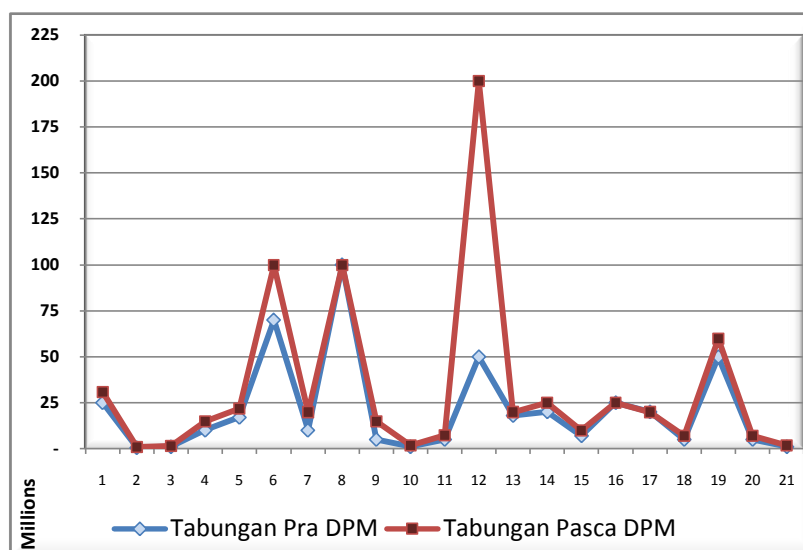
Garis biru menandakan besarnya nilai aset usaha sebelum menerima DPM dan garis merah menandakan besarnya nilai aset usaha setelah menerima DPM. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 73,81% atau 31 responden mengalami kenaikan

nilai aset setelah menerima DPM. Beberapa responden yakni 26,19% atau 11 responden memiliki aset yang sama nilainya setelah menerima DPM. Tidak ada satu responden pun yang mengalami penurunan nilai aset setelah menerima DPM.

Nilai rata-rata aset yang dimiliki pelaku UMKM sebelum menerima DPM adalah Rp229.773.810,00. Setelah menerima DPM, rata-rata nilai aset bertambah Rp42.630.952,00 menjadi Rp272.404.762,00. Rata-rata pertumbuhan nilai aset setelah menerima DPM adalah sekitar 18,55%. Nilai aset para pelaku UMKM sebelum menerima DPM berkisar antara Rp4.000.000,00 sampai dengan Rp1.872.500.000,00. Sedangkan nilai aset para pelaku UMKM setelah menerima DPM berkisar antara Rp6.000.000,00 sampai dengan Rp1.872.500.000,00.

#### 5) Tabungan

Perbandingan tabungan yang dimiliki pelaku UMKM sebelum dan setelah DPM dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 8. Perbandingan Tabungan Sebelum dan Setelah DPM

Hanya data tabungan dari 21 responden yang bisa diolah dalam penelitian ini. Sebagian responden menyatakan mereka tidak memiliki tabungan sehingga tidak memiliki data tabungan sebelum dan setelah menerima DPM.

Pada grafik, garis biru menandakan besarnya tabungan sebelum menerima DPM dan garis merah menandakan besarnya tabungan setelah menerima DPM. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa seluruh garis merah berada di atas garis biru. Hanya ada beberapa garis biru yang sejajar dengan garis merah. Hal ini menandakan bahwa tabungan para responden sebagian besar mengalami kenaikan setelah menerima DPM.

Rata-rata tabungan yang dimiliki pelaku UMKM sebelum menerima DPM adalah Rp21.214.286,00. Rata-rata tabungan ini meningkat 55,11% menjadi Rp32.904.762,00. Kenaikan rata-rata

tabungan setelah menerima DPM adalah Rp11.690.476,00. Mayoritas besarnya tabungan yang dimiliki pelaku UMKM sebelum menerima DPM adalah Rp5.000.000,00 sedangkan setelah menerima DPM adalah Rp20.000.000,00. Pertumbuhan jumlah tabungan setelah menerima DPM paling tinggi mencapai 300% atau meningkat 3 kali lipat dari jumlah tabungan yang dimiliki sebelum menerima DPM. Sedangkan kenaikan paling rendah adalah 11,11% dari tabungan sebelum menerima DPM.

c. Permasalahan dan Kendala dalam DPM

Berikut ini sajian tabel kendala yang dialami oleh para penerima DPM.

Tabel 30. Kendala dalam Pengelolaan DPM

<b>Kendala</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak Ada	20	40
Ada	30	60
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, diolah (2014)

Dalam mengelola DPM, sebagian responden tidak mengalami kendala yang berarti. Akan tetapi sebagian responden yang lain yaitu 60% responden mengalami beberapa kesulitan dalam pengelolaan pinjaman DPM. Kendala yang menghambat pemanfaatan DPM dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal merupakan kendala yang berasal dari dalam diri pelaku UMKM itu sendiri. Sedangkan kendala eksternal merupakan



kendala yang berasal dari luar diri pelaku UMKM. Berikut ini kendala-kendala yang menghambat pemanfaatan DPM secara optimal:

Tabel 31. Bentuk Kendala dalam Pengelolaan DPM

No.	Bentuk Kendala	Jumlah Responden	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>Internal</b>	<b>12</b>	<b>40,0</b>
	a Manajemen Keuangan	7	23,3
	b Manajemen Tenaga Kerja	1	3,3
	c Manajemen Pemasaran	1	3,3
	d Kesulitan bahan baku	1	3,3
	e Lupa mengangsur	2	6,7
<b>2</b>	<b>Eksternal</b>	<b>18</b>	<b>60,0</b>
	a Jumlah Pinjaman Sedikit	9	30,0
	b Waktu Angsuran Pendek	3	10,0
	c Pencairan terlambat	3	10,0
	d Penggunaan Agunan	1	3,3
	e Administrasi	1	3,3
	f Bencana Alam	1	3,3
<b>TOTAL(1+2)</b>		<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, diolah (2014)

Kendala internal paling banyak yaitu 23,3% yang menghambat responden dalam pengelolaan DPM adalah kurangnya kemampuan manajemen keuangan para responden. Kendala berikutnya yaitu 6,7% responden adalah lupa mengangsur. Sedangkan kendala internal yang lainnya adalah manajemen tenaga kerja, pemasaran dan kesulitan bahan baku.

Kendala eksternal yang paling banyak yaitu 30% responden adalah jumlah pinjaman yang dinilai terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diajukan dalam proposal pinjaman. Selain itu, jangka waktu angsuran yang dinilai terlalu pendek (10%) sehingga pembebanan angsuran menjadi lebih besar. Jangka waktu

pencairan yang sangat lambat juga menghambat pemanfaatan DPM. Kendala berikutnya yang muncul adalah masalah administrasi, kesulitan dalam memenuhi persyaratan agunan dan adanya bencana alam.

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan DPM, bentuk manfaat DPM dan permasalahan/kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam pelaksanaan DPM. Terkait dengan tujuan penelitian tersebut maka hasil penelitian ini juga akan membahas mengenai kemanfaatan DPM, bentuk kemanfaatan DPM dan permasalahan/kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam pelaksanaan program DPM.

### **1. Kemanfaatan DPM**

Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui apakah penyaluran DPM bermanfaat bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa program DPM mampu memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM penerimanya. Dampak positif tersebut meliputi adanya peningkatan kinerja usaha 96% pelaku UMKM penerima DPM, perkembangan usaha seluruh pelaku UMKM setelah menerima DPM, peningkatan tabungan 68% pelaku UMKM setelah menerima DPM dan peningkatan kesejahteraan 98% keluarga pelaku UMKM penerima DPM. DPM juga telah berperan dalam membantu kesuksesan usaha seluruh pelaku UMKM penerimanya. Dan sebagian besar tepatnya 70% pelaku UMKM penerima DPM akan

kesulitan apabila KP3M tidak memberikan DPM. DPM secara umum bermanfaat bagi pelaku UMKM.

## 2. Bentuk Kemanfaatan DPM

Mengacu pada perbandingan lima indikator penelitian yaitu modal usaha, jumlah tenaga kerja, pendapatan usaha, nilai aset dan besarnya tabungan sebelum dengan setelah menerima DPM ternyata hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan diantara kelima indikator tersebut sebelum dengan setelah menerima DPM. Diantara kelima indikator tersebut, modal usaha adalah indikator yang paling besar persentase kenaikannya. Modal usaha yang dimiliki UMKM naik 45% dari modal sebelumnya sehingga UMKM yang sebelumnya kekurangan modal dapat terbantu setelah menerima pinjaman DPM ini. Hal ini sesuai dengan dasar pelaksanaan DPM yaitu penguatan modal bagi para pelaku usaha khususnya pelaku UMKM. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peranan sangat penting yaitu sebagai penggerak roda perekonomian. Penambahan modal usaha akan dapat meningkatkan output dan pendapatan. Untuk mendapatkan tambahan modal, para pelaku usaha umumnya harus mengakses lembaga perkreditan/lembaga keuangan dimana pengajuan tambahan modal dikenakan biaya tambahan seperti biaya bunga dan biaya administrasi. Sedangkan DPM memberikan tambahan modal meskipun dengan bunga tetapi biaya bunga yang sangat ringan yaitu 0,5% per bulan. Oleh karena

itu, DPM dalam memberikan pinjaman modal sangat besar manfaatnya bagi para pelaku UMKM.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, peningkatan modal usaha secara umum akan meningkatkan pendapatan usaha. Hal ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam hasil penelitian selain meningkatkan modal usaha, pendapatan usaha pelaku UMKM pun mengalami kenaikan setelah menerima DPM. Peningkatan pendapatan usaha ini sesuai dengan maksud dan tujuan DPM yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya peningkatan pendapatan menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan pula.

DPM selain bermanfaat dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha, juga memiliki dampak positif terhadap nilai aset yang dimiliki UMKM. Secara umum, nilai aset yang dimiliki UMKM meningkat 18,55% dari nilai aset sebelumnya. Peningkatan nilai aset ini lebih rendah dibandingkan peningkatan indikator lainnya. Hal ini diduga karena sebelum menerima DPM UMKM sudah memiliki nilai aset yang cukup tinggi yaitu rata-rata Rp200juta-an. Dikarenakan nilai aset yang sudah cukup tinggi ini maka tambahan dana yang diterima tidak akan memberikan efek/dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan nilai aset. Pelaku UMKM yang rata-rata telah memiliki aset yang cukup tinggi ini, pada akhirnya memprioritaskan DPM bukan untuk penambahan nilai aset akan tetapi guna menambah modal kerja produksi sehari-hari.

Apabila seluruh UMKM mengalami peningkatan modal, maka tidak demikian dengan besarnya tabungan yang dimiliki. Meskipun rata-rata tabungan responden mengalami peningkatan sekitar 55,11% dari tabungan sebelumnya, akan tetapi sebagian responden tidak mengalami peningkatan tabungan. Hal ini dikarenakan DPM yang diterima tidak dimasukkan dalam tabungan tetapi diputar kembali sebagai modal kerja untuk meningkatkan produktivitas usaha. Oleh karena itu bisa dikatakan pinjaman DPM bermanfaat tidak secara signifikan terhadap tingkat tabungan yang dimiliki pelaku UMKM.

Meskipun UMKM merupakan usaha yang memiliki baik omset maupun aset yang jumlahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan Usaha Besar (UB), tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari UB. Dari hasil penelitian jumlah rata-rata tenaga kerja yang bekerja di UMKM naik 11,90% setelah menerima DPM. Dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM menunjukkan bahwa setelah adanya DPM, UMKM dapat memberikan kesempatan kerja yang baru bagi para pencari kerja khususnya di sekitar Kabupaten Sleman. Hal ini bisa membantu mengurangi jumlah angkatan kerja yang belum terserap dengan lapangan kerja yang ada sebelumnya.

Selain itu, dari hasil penelitian rata-rata pendidikan pelaku UMKM bukanlah pendidikan dasar saja melainkan 42% pelaku UMKM berpendidikan menengah atas bahkan 30% responden sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM juga mampu menyerap angkatan kerja

berpendidikan yang tidak terserap dalam lapangan kerja perusahaan-perusahaan besar sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terdidik.

### 3. Permasalahan dan Kendala dalam DPM

Meskipun secara umum DPM memiliki manfaat yang besar terhadap usaha yang dijalani responden, namun ada beberapa hal yang menyebabkan pemanfaatan DPM kurang optimal. Hal-hal yang mengganggu pemanfaatan DPM tersebut akan dibahas dalam bagian ini. Kendala dalam pengelolaan DPM sehingga DPM belum dimanfaatkan dengan optimal dibagi menjadi dua yaitu kendala yang berasal dari dalam diri penerima sendiri atau disebut kendala internal dan kendala yang berasal dari luar penerima DPM atau disebut kendala eksternal.

Dari hasil penelitian, kendala internal yang mempengaruhi pemanfaatan DPM antara lain kurangnya keahlian manajemen yang dimiliki pelaku UMKM. Sebagai pelaku usaha, sangat penting memiliki berbagai macam keahlian manajemen pengelolaan usaha. Beberapa keahlian yang kurang dimiliki para pelaku UMKM antara lain keahlian mengelola keuangan, mengelola pemasaran, mengelola produksi dan mengelola tenaga kerja. Kurangnya ketrampilan manajemen para pelaku UMKM ini menghambat pemanfaatan DPM secara optimal.

Kendala internal berikutnya adalah ketidakdisiplinan waktu pengangsuran. Dalam melakukan pembayaran angsuran, 14% responden belum mampu membayar sesuai dengan waktu pembayaran yang

seharusnya. Keterlambatan pembayaran angsuran tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya kurangnya ketrampilan pengelolaan keuangan sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran malah digunakan untuk hal-hal lain diluar kegiatan produksi. Hal-hal lain tersebut diantaranya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar biaya sekolah, membayar biaya pengobatan, membayar kebutuhan sosial, dan sebagainya.

Selain kendala internal, ada pula kendala eksternal yang mempengaruhi pemanfaatan DPM. Kurangnya akses informasi mengenai prosedur dan jadwal pencairan DPM membuat para penerima DPM mengalami kesulitan dalam pengoptimalan DPM. Contohnya saja mengenai jadwal pencairan yang tidak sesuai dengan perkiraan pelaku UMKM mengakibatkan pelaku UMKM kehilangan kesempatan memanfaatkan peluang usaha yang besar di momen-momen tertentu seperti momen hari raya. DPM yang diandalkan UMKM guna menambah modal kerja untuk menangkap peluang usaha di hari raya ternyata belum bisa dicairkan membuat UMKM tidak bisa mengoptimalkan produktivitas usahanya. Sebagian besar UMKM juga mengalami kesulitan mengelola pinjaman DPM yang ternyata jumlah pencairan dana jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah dana yang diajukan. Jumlah pencairan yang dinilai tidak mencukupi ini membuat pelaku UMKM kesulitan untuk merealisasikan perencanaan penggunaan DPM yang telah disusun sebelumnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pengamatan dan proses analisis data deskriptif dengan subyek penelitian para pelaku UMKM penerima DPM di Kabupaten Sleman yang berjumlah 50 orang, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting berkaitan tentang penelitian kemanfaatan DPM di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Pinjaman DPM bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman dalam hal kinerja usaha (96%), pengembangan usaha (100%), tabungan (68%) responden, kesejahteraan keluarga (98%) dan kesuksesan usaha (100%).
2. Bentuk manfaat yang diperoleh para pelaku UMKM setelah menerima DPM antara lain:
  - a. Terjadinya peningkatan modal usaha para pelaku UMKM, dimana rata-rata modal sebelum mendapatkan pinjaman DPM sebesar Rp70.425.532,00 menjadi Rp102.117.021,00 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 45%.
  - b. Terjadinya peningkatan pendapatan usaha, dimana rata-rata pendapatan sebelum menerima pinjaman DPM sebesar Rp7.675.000,00/bulan atau Rp92.100.000,00/tahun menjadi Rp10.313.551,00/bulan atau Rp123.762.609,00/tahun setelah menerima pinjaman DPM atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 34,38%.



- c. Terjadinya peningkatan nilai aset, dimana rata-rata nilai aset sebelum menerima pinjaman DPM sebesar Rp229.773.810,00 menjadi Rp272.404.762,00 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 18,55%.
  - d. Terjadinya peningkatan jumlah tabungan, dimana rata-rata jumlah tabungan yang dimiliki sebelum menerima pinjaman DPM sebesar Rp21.214.286,00 menjadi Rp32.904.762,00 atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 55,11%.
  - e. Terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja, dimana sebelum menerima DPM rata-rata jumlah tenaga kerja sebanyak 7 orang menjadi 8 orang atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 11,90%.
3. Kendala yang menghambat pengelolaan DPM adalah jumlah pinjaman DPM yang disalurkan ke beberapa responden memiliki nilai yang lebih kecil dari kebutuhan modal para pelaku UMKM. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa banyak pelaku UMKM yang sudah dapat mengakses kredit pada lembaga keuangan. Sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah pinjaman dari lembaga keuangan, jumlah pinjaman dari DPM masih terlalu sedikit. Kendala yang lainnya adalah kemampuan manajerial usaha yang dimiliki kebanyakan pelaku UMKM masih minim sehingga pengelolaan usaha mulai dari keuangan, pemasaran, ketenagakerjaan sampai pada bahan baku masih belum baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan manfaat yang dapat diperoleh dari pinjaman DPM, maka Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya KP3M hendaknya tetap mempertahankan penyaluran pinjaman DPM sehingga kebutuhan modal UMKM dapat terpenuhi.
2. Berkaitan dengan bentuk manfaat yang diperoleh dimana setelah memperoleh DPM, maka:
  - a. Para pelaku UMKM hendaknya dapat memanfaatkan peningkatan modal ini untuk mengembangkan usahanya dengan cara menambah volume usaha, bukan digunakan untuk kebutuhan di luar usaha.
  - b. Para pelaku UMKM hendaknya tetap mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja usaha sehingga pendapatan usaha yang dijalankan dapat terus mengalami pertumbuhan.
  - c. Para pelaku UMKM hendaknya dapat lebih memanfaatkan aset yang ada.
  - d. Para pelaku UMKM yang belum memiliki tabungan usaha hendaknya mulai menyisihkan pendapatan untuk ditabung sebagai dana cadangan usaha yang penting apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam.
  - e. Para pelaku UMKM diharapkan dapat mengelola tenaga kerja yang sudah dimiliki dengan optimal.

3. Berkaitan dengan kendala yang menghambat pemanfaatan DPM saat ini, diperlukan pendampingan teknis bagi para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan manajemen usaha. Selain itu, KP3M ataupun instansi terkait dapat menyelenggarakan pelatihan usaha terkait dengan manajemen usaha yang baik dengan narasumber yang kompeten agar pengetahuan dan ketrampilan manajemen usaha para pelaku UMKM dapat meningkat.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. Dalam pengumpulan data variabel penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak menunjukkan kenyataan sesungguhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edy Suhardono. 2001. *Refleksi Metodologi Riset Panorama Survey*. Surabaya: Gramedia Pustaka Utama.
- Edy Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Faisal Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayatullah. 2011. "Peranan Adaptabilitas, Orientasi Kewirausahaan Dan Inovasi Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro". *Disertasi*. Universitas Brawijaya. Malang: Lembaga Penelitian.
- Kasmir. 2006. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Liyana Apriyanti. 2011. "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang.
- Mubyarto. 2001. *Prospek Otonomi Daerah Dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Mudrajad Kuncoro. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mudrajad Kuncoro. 2010. *Ekonomika Pembangunan (Masalah, Kebijakan dan Politik)*. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi Nitisusastro. 2012. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Nuke Prasetiani Nurhayati. 2007. Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. UNES Semarang.
- Rahardjo Adisasmita. 2013. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Regina Sari. 2011. "Pengaruh Kredit Dana Bergulir Terhadap Tingkat Pendapatan Pengusaha Makanan Olahan Anggota Koperasi KJK PEMK Kebayoran Lama Utara". *Skripsi*. Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Rifda Zahra Afifah. 2012. "Analisis Bantuan Modal Dan Kredit Bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Semarang". *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang.
- Ruswati. 2005. "Efektivitas Pelayanan Publik". *Skripsi*. Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto.
- Sadono Sukirno. 2010. *Ekonomika Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sunyoto Usman. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- T. Sumarnonugroho. 1987. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindita.
- Tiktik Sartika Partomo dan Abdur Rachman Soedjono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tulus Tambunan. 2006. Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah. *Makalah Seminar*. Pasca sarjana UNISRI.
- Wasistiono Sadu. 1998. *Pemberdayaan Aparatur Daerah*. Bandung: Abdi Praja.
- Yuyus Suryana dan Kartib Bayu. 2013. *Kewirausahaan (Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses)*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur DPM
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2013 tentang Dana Penguatan Modal
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2010 tentang RPJMD 2001 – 2015
- Peraturan Pemerintah Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang DPM
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Laporan DPM Semester I tahun 2013

Laporan DPM Semester II tahun 2013

Laporan Tahunan Disperindagkop Sleman 2013

Pedoman Umum DPM

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada 15 Mei 2014 pukul 08.10 WIB.

[www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) diakses pada 24 Maret 2014 pukul 08.20 WIB.

[www.shvoong.com](http://www.shvoong.com) diakses pada 15 Mei 2014 pukul 09.00 WIB.

# LAMPIRAN

## 1. DAFTAR POPULASI PENELITIAN

NO	PERIODE	NAMA USAHA	NAMA PEMILIK	BIDANG USAHA
1	2010-2012/I	Modiste Lia	Atik Sunarwati	IKM
2	2010-2012/I	Usaha Mandiri	Wasirah	IKM
3	2010-2012/I	AK. Sokka	Subiharjo	IKM
4	2010-2012/I	Ayam Goreng Mbak Wanti*)	Ny. Wantini*)	IKM
5	2010-2012/I	Yanti Collection	Muchlis	IKM
6	2010-2012/I	UD. Batu Alam Raya	H. Ngadiman, S.Ag	IKM
7	2010-2012/I	AM. Collection	Sulasmi	IKM
8	2010-2012/I	Rus't Craft	Rustiningsih	IKM
9	2010-2012/I	Batik Dinda Hayu	Riyo Ety	IKM
10	2010-2012/I	Fanri Collection	Sulaeman	IKM
11	2010-2012/I	Painem	Painem	IKM
12	2010-2012/I	UD. Surya Jaya	Nuryanta	IKM
13	2010-2012/I	Sempurna	Maryadi	IKM
14	2010-2012/I	Kecap Ayam Panggang	Budi Santoso	IKM
15	2010-2012/I	Couture De Lala Et Tata	Dra. Astariyatun	IKM
16	2010-2012/I	UD. Batu Alam Peg. Seribu	Ngatijo	IKM
17	2010-2012/I	Joko Material	Joko Susilo	IKM
18	2010-2012/I	CV. Metayani Cemerlang	Yakubus	Perdagangan
19	2010-2012/I	Mulya Accu	Sugeng	Perdagangan
20	2010-2012/I	Kios Warna	Imelda Wismudyastuti	Perdagangan
21	2010-2012/I	Famili Citra Abadi	Mei Eko Marwiyati	Perdagangan
22	2010-2012/I	Jaya Makmur	Ignatius Febriyono Sedewo	Perdagangan
23	2010-2012/I	Tomy Zone	Tomy Hendrawanto	Perdagangan
24	2010-2012/I	Yudhi Motor	Rahayudi	Bengkel
25	2010-2012/I	Enggal Makmur	Hj. Sri Sumaryani	Perdagangan
26	2010-2012/I	Nurdin Hair Style	Badarudin	Jasa
27	2010-2012/II	Usaha Maju	Sarmidi	IKM
28	2010-2012/II	Jarum Pentul*)	Riza Syahrial, ST.	IKM
29	2010-2012/II	Qolbun Salim	HM. Sonhaji, BA	IKM
30	2010-2012/II	Bakpia Dewi	Rr. Dewi Nurcahyani H	IKM
31	2010-2012/II	CV. Triwida	Suratman	IKM
32	2010-2012/II	CV. Bravo	Endang Ambarwatiningsih	IKM
33	2010-2012/II	Robert's Shop	Isaac Indarta, A.Md.	Toko material, dll
34	2010-2012/II	Sarwo Karyo	Agus Hariyadi	Dagang Beras
35	2010-2012/II	UD Nugraha	Dra. Dwiani Nugraha	Tekstil
36	2010-2012/III	Karunia	Oktaviana Tri	IKM
37	2010-2012/III	Makmur Berkat Susu	Ir. Latri Mulyaningsih,	IKM
38	2010-2012/III	Rosa Jaya Abadi	Mulyani, ST.*)	IKM
39	2010-2012/III	Putra Mandiri	Muh Bisri	IKM



40	2010-2012/III	Sido Jadi Material	Ulu Alan Surengga	IKM
41	2010-2012/III	Mutiara Sari	Sujiono	IKM
42	2010-2012/III	UD Sejati Karya	Karyono Noto Sejati, SIP	IKM
43	2010-2012/III	UD Wira Karya Teknindo	Siswanto*)	IKM
44	2010-2012/III	Widya	Prastiati	IKM
45	2010-2012/IV	Hasta	Siharti	IKM
46	2010-2012/IV	Nieka	Estriningrum Rahajeng	IKM
47	2010-2012/IV	Mekar Sari	Drs. Imam Suwandi	IKM
48	2010-2012/IV	Tempe Hartini	Ny. Hartini	IKM
49	2010-2012/IV	Tronter Auto Service	Tri Winarno	IKM
50	2010-2012/IV	Sahid Jaya	Erwan Saidi	IKM
51	2010-2012/IV	Stone Bima Klasik Mr	Sri Widodo	IKM
52	2010-2012/IV	Menik's	Harmini	IKM
53	2010-2012/IV	Tepat	Jamal Heni Suminto	IKM
54	2011-2013/I	Daun Salam	Imam Bukhori	IKM
55	2011-2013/I	YH. Chandra	Yusmaniar	IKM
56	2011-2013/I	CV Multi Guna	Drs. Dodo Suparjiyoto	IKM
57	2011-2013/I	Larasati	Endang Murtiningsih	IKM
58	2011-2013/I	Batu Alam Murni	Mujimin	IKM
59	2011-2013/I	Mekar Jaya	Jemina	IKM
60	2011-2013/I	Epata Collection	Maria Suyanti	IKM
61	2011-2013/I	UD Bhakti Material	H. Sudaryana, SPd.	IKM
62	2011-2013/I	Tri Busana Jasa	Sunarti	IKM
63	2011-2013/I	Sari Rasa	Suyanti	IKM
64	2011-2013/I	Rumah Kompos Putra S.	Kiyat Raharjo	IKM
65	2011-2013/I	Sakimin	Sakimin	IKM
66	2011-2013/II	Putra Katong	Komrul Huda	IKM
67	2011-2013/II	Karya Bunda	Menuk Sayekti	IKM
68	2011-2013/II	Triwida	Suratman	IKM
69	2011-2013/II	Krupuk KMD	Anita Nurlailasari	IKM
70	2011-2013/II	UD. Reza Mandiri/Reza Paint	Sahibul Khoiri	IKM
71	2011-2013/II	Budi Karya	FX. Budi Santosa	IKM
72	2011-2013/II	Adri Kusen Cor	Adri Wahono	IKM
73	2011-2013/II	Rapih Motor	Drs. Setiana	IKM
74	2011-2013/II	UD. Anung	Damsuki	IKM
75	2011-2013/II	Mudek Teknik	Mudi Wiyono	IKM
76	2011-2013/II	UD. Lestari	Siswo Wiyono	IKM
77	2011-2013/II	Alea Production*)	Evy Nur Shakuntala	IKM
78	2011-2013/III	UD. Warno	Gandung Wardoyo	IKM
79	2011-2013/III	Sokka Barokah	Yamyadi Barokah	IKM
80	2011-2013/III	Restu Bunda Sentosa	Bagus Budi Santoso	IKM
81	2011-2013/III	PWS	Wahono Warsito	IKM

82	2011-2013/III	Ara Mebel	Syahrizal Panjaitan	IKM
83	2011-2013/III	Putra Bandung Bondowoso	Tulakir	IKM
84	2011-2013/III	Eka Jaya	Mardiyanto	IKM
85	2011-2013/III	Jaya Led	Petrus Rilo Irianto	IKM
86	2011-2013/IV	Ratu Bata	Agus Joko Widodo	IKM
87	2011-2013/IV	Sumber Rejeki	Sulistyo Nugroho	IKM
88	2011-2013/IV	Warung Ayam Ungkep	Siti Rohmani	IKM
89	2011-2013/IV	Hadi Susanto	Hadi Susanto	IKM
90	2011-2015/2	UD Surya Abadi	Sri Widayati	Dagang
91	2012-2014/1	Anggrek	Kartikaningsih	IKM
92	2012-2014/1	UD. Zago	Agus Sriyono	IKM
93	2012-2014/1	UD. Ratu Alam Peg. Seribu	Ngatijo	IKM
94	2012-2014/2	Dian Baru	Marjono	Servis ual beli aki
95	2012-2014/2	TB Dhia Sukses	Agung Pramana, SH	TB dan material
96	2012-2014/2	Samudra Beton Harta	Henny Rosilawati	Perdagangan
97	2012-2014/2	CV Citha Makmur Lestari	Dra. Siti Asmah	Sembako
98	2012-2014/2	Jepara Meubel Group (JMG)	S. Noorhidayat Dwiwindayati	IKM
99	2012-2014/2	UD. Karya Jaya Banyu Rejo	Budi Santoso	IKM
100	2012-2014/2	CV Art Strowberry	Wisnu Dhata	IKM
101	2012-2014/3	Cipta Rasa	Elva Alhabsyi	IKM
102	2012-2014/3	Herbatama Waras Abadi	Suwarji	IKM
103	2012-2014/3	Sokka Inti	Sumirah	IKM
104	2013-2015/1	Vitria	ROSALIA MARIA SUWITRI	Perdagangan
105	2013-2015/1	Sari Kedelai "BU ADE"	Ir. Rahayu Widowati	IKM
106	2013-2015/1	INTAN RAHMADHANI	SRI ENDAH KURNIAWATI	IKM
107	2013-2015/3	Gisa Food	VERONIKA SUDIATI	IKM
108	2013-2015/3	AADS	SUSI HARINI	IKM

## 2. DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

No	Periode	Nama Usaha	Nama Pemilik	Bidang
1	2013-2015/3	Aads	Atik Sunarwati	Ikm
2	2010-2012/I	Ak Sokka	Sabiharjo	Ikm
3	2011-2013/Ii	Alea Production	Evy Nur Shakuntala	Ikm
4	2012-2014/1	Anggrek	Kartikaningsih	Ikm
5	2010-2012/I	Batik Dinda Hayu	Riyo Ety	Ikm
6	2010-2012/I	Couture De Lala Et Tata	Astariyatun	Ikm
7	2012-2014/2	Cv Art Strawberry	Laila	Ikm
8	2011-2013/I	Cv. Multiguna	Wiwik Dwi Lestari	Ikm
9	2012-2014/2	Dian Baru	Marjono	Servis Aki
10	2011-2013/III	Eka Jaya	Mardiyanto	Ikm
11	2011-2013/I	Epata Collection	Maria Suyanti	Ikm
12	2010-2012/I	Family Citra Abadi	Mei Eko M.	Perdagangan
13	2013-2015/3	Gisa Food	Veronika Sudiati	Ikm
14	2013-2015/1	Intan Rahmadhani	Sri Endah Kurniawati	Ikm
15	2012-2014/2	Jepara Mebel Group	Noorhidayati	Ikm
16	2010-2012/I	Joko Material	Joko Susilo	Ikm
17	2011-2013/Ii	Krupuk Kmd	Anita Nurlailasari	Ikm
18	2011-2013/I	Mekar Jaya	Jemina	Ikm
19	2010-2012/IV	Menik's	Harmini	Ikm
20	2010-2012/I	Modiste Lia	Susi Harini	Ikm
21	2011-2015/2	Ud. Surya Abadi	Andre Kurnia	Dagang
22	2010-2012/Ii	Pp. Sarwo Karyo	Agus Hariyadi	Dagang
23	2011-2013/Iii	Putra Bandhung Bondowoso	Tulakir	Ikm
24	2010-2012/Iii	Putra Mandiri	Muh. Bisri	Ikm
25	2011-2013/Iii	Pws	Wahono Warsito	Ikm
26	2010-2012/Ii	Qolbun Salim	Hj. Endang Puji A., Ba.	Ikm
27	2011-2013/Ii	Rapih Motor	Setyana	Ikm
28	2010-2012/Ii	Roberts Shop	Isaac Indarta	Toko Besi
29	2010-2012/Iii	Rosa Jaya Abadi	Mulyani	Ikm
30	2010-2012/I	Rus't Craft	Rustiningsih	Ikm
31	2010-2012/IV	Sahid Jaya	Titik Yuliani	Ikm
32	2011-2013/I	Sakimin	Sakimin	Ikm
33	2012-2014/2	Samudera Beton Harta	Masdjat Sodiki	Perdagangan
34	2013-2015/1	Sari Kedelai "Bu Ade"	Rahayu Widowati	Ikm
35	2011-2013/I	Sari Rasa	Suyanti	Ikm
36	2012-2014/3	Sokka Inti	Sumirah	Ikm
37	2012-2014/2	Tb Dhia Sukses	Agung Pramana, Sh.	Tb Dan Material
38	2010-2012/IV	Tepat	Yumi Astuti	Ikm
39	2011-2013/I	Tri Busana Jasa	Hj. Sunarti	Ikm
40	2010-2012/IV	Tronter Auto Service	Tri Winarno	Ikm
41	2011-2013/Ii	Ud. Anung	Yuli Heri Setyo	Ikm
42	2010-2012/I	Ud. Batu Alam Raya	Ngadiman	Ikm

43	2012-2014/2	Ud. Karya Jaya	Budi Santoso	Ikm
44	2012-2014/1	Ud. Ratu Alam Peg.	Ngatijo	Ikm
45	2011-2013/Ii	Ud. Reza Mandiri	Sahibul Khoiri	Ikm
46	2011-2013/Iii	Ud. Warno	Gandung Wardoyo	Ikm
47	2012-2014/1	Ud. Zago	Dewi Retno Heryani	Ikm
48	2010-2012/Ii	Usaha Maju	Sarmidi	Ikm
49	2011-2013/Iv	Warung Makan Ayam Ungkep	Siti Rohmani	Ikm
50	2010-2012/Iii	Widya Modiste	Prastiati	Ikm

Kepada:  
Yth. Bapak/Ibu Responden  
Di Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera untuk kita semua.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian kerjasama antara KP3M dan Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “**Studi Eksplorasi Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal (DPM) bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Sleman**”, maka kami memohon dengan hormat agar Bapak/Ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan DPM yang Bapak Ibu terima dari Pemda Sleman melalui KP3M.

Kami mohon Bapak/Ibu mengisi angket ini dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu alami terkait dengan pengelolaan DPM. Jawaban objektif Bapak/Ibu sangat kami perlukan agar simpulan penelitian ini terjaga kebenarannya. Kami menjamin bahwa jawaban Bapak/Ibu tidak akan berpengaruh apapun pada kedudukan dan kegiatan usaha Bapak/Ibu saat ini. Jawaban Bapak/Ibu justru akan sangat membantu KP3M agar instansi ini bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat penerima DPM di waktu yang akan datang.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga kebaikan Bapak/Ibu menjadi barokah bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Tim Peneliti

## INSTRUMEN PENELITIAN

Petunjuk: Lengkapi pertanyaan isian dengan mengisi titik-titik yang tersedia dan untuk pertanyaan pilihan dengan melingkari pilihan jawaban yang sesuai

### A. KARAKTERISTIK UMUM RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan
4. Umur : .....
5. Pendidikan Tertinggi : (1) Tidak lulus SD (2) SD (3) SMP  
(4) SMA/SMK (6) D-1/D-2/D-3  
(7) S-1 (8) Lainnya:.....
6. Status pernikahan : (1) Menikah (2) Belum menikah  
(3) Janda/Duda
7. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan :.....
8. Ada bantuan anggota keluarga dalam menjalankan usaha: (1) YA (2) TIDAK
9. Bila YA jumlah anggota keluarga yang terlibat sebagai tenaga kerja :.....

### B. KARAKTERISTIK UMUM USAHA

1. Bidang Usaha/Kelompok Usaha : .....
2. Tahun berdirinya usaha Bapak/Ibu : .....
3. Bila usaha Bapak /Ibu tergabung dalam kelompok usaha:
  - a. kedudukan Bapak/Ibu dalam kelompok adalah:  
(1) Pengurus Kelompok (2) Anggota Kelompok
  - b. Tahun berdirinya kelompok usaha:.....
  - c. Tahun Bapak/Ibu tergabung dalam kelompok usaha:.....
  - d. Jumlah anggota kelompok ada awal berdirinya:.....
  - e. Jumlah anggota kelompok saat ini:.....
4. Sumber modal awal usaha : (1) Tabungan pribadi  
(2) Pinjaman dari teman  
(3) Pinjaman dari saudara  
(4) Pinjaman dari lembaga kredit/keuangan  
(5) Sumber lainnya:.....

### C. KARAKTERISTIK DANA PINJAMAN MODAL DARI KP3M

1. Besarnya pinjaman yang Bapak/Ibu terima: Rp.....
2. Apakah jumlah pinjaman tersebut mencukupi ? (1). YA (2). TIDAK

3. Pinjaman DPM Bapak/Ibu gunakan untuk:
  - (1). Menambah modal kerja
  - (2). Membeli asset
  - (3). Lainnya .....
4. Sudah berapa kali Bapak/Ibu memperoleh DPM dari KP3M? Jawab: ..... kali
5. Apakah masa tenggang (*grace period*) tersebut cukup layak dan memungkinkan Bapak/Ibu mampu membayar angsuran dengan menggunakan keuntungan usaha?
  - (1) YA
  - (2). TIDAK
6. Lama periode pinjaman yang Bpk/Ibu lakukan:
 

.....
7. Periode pembayaran angsuran pinjaman: (1) Harian (3) Bulanan
  - (2) Mingguan (4) Lainnya .....
8. Besarnya angsuran yang Bapak/Ibu bayarkan per periode: Rp.....
9. Jumlah angsuran yang harus Bapak/Ibu lakukan:.....kali
10. Menurut Bapak/Ibu besar angsuran yang dibayarkan:
  - (1) Ringan
  - (2) sesuai dengan kemampuan
  - (3) berat
11. Jumlah angsuran yang sudah Bapak/Ibu lakukan:.....kali
12. Apakah Bapak/Ibu membayar angsuran pinjaman melalui kelompok tepat waktu?
  - (1) YA
  - (2) TIDAK
13. Apakah Bapak/Ibu menerima bukti pembayaran (misalnya kuitansi) angsuran pinjaman dari kelompok?
  - (1) YA
  - (2) TIDAK
14. Apakah Kelompok Bapak/Ibu membayar angsuran pinjaman tepat waktu pada KP3M?
  - (1) YA
  - (2) TIDAK
15. Bila Bapak/Ibu menjawab TIDAK, jelaskan apa alasannya:
 

.....

.....

.....

.....

.....
16. Apakah pinjaman DPM ini mempersyaratkan adanya agunan? (1) YA (2) TIDAK
17. Bila Bpk/Ibu menjawab YA, jenis agunan yang Bapak/Ibu gunakan
 

.....
18. Apakah menurut Bapak/Ibu kontribusi (bunga) yang harus Bapak Ibu bayarkan terlalu tinggi?
  - (1) YA
  - (2) TIDAK

19. Jika jawaban Bapak/Ibu “YA”, menurut Bapak/Ibu berapa kontribusi (bunga) yang sesuai dengan hasil usaha Bapak/Ibu? Jawab: ..... % per .....
20. Apakah Bapak/Ibu juga memperoleh pinjaman dari lembaga selain KP3M  
 (1) YA (2) TIDAK  
 Jika jawaban Bapak/Ibu “Ya”  
 a. Nama lembaga lain pemberi kredit: .....  
 b. Berapa kontribusi (bunga) yang Bapak/Ibu bayarkan: .....% per .....
21. Pengeluaran lain yang sering Bapak/Ibu lakukan dengan menggunakan DPM yang dapat menghalangi/mengganggu pemanfaatan pinjaman Bapak/Ibu untuk tujuan produktif: (jawaban bisa lebih dari satu)  
 (1) Tidak ada  
 (2) Membayar biaya sekolah anak  
 (3) Biaya berobat  
 (4) Pengeluaran konsumsi sehari-hari  
 (5) Pengeluaran untuk kebutuhan sosial kemasyarakatan (nyumbang, membantu saudara, dll)  
 (6) Membayar utang  
 (7) Lainnya:.....

**D. PERBANDINGAN KARAKTERISTIK USAHA SEBELUM DAN SETELAH MENDAPAT DPM DARI KP3M**

No.	Indikator	Sebelum Mendapat DPM	Setelah Mendapat DPM
1	Modal Usaha	Rp.	Rp.
2	Jumlah Tenaga Kerja		
3	Rata-rata Pendapatan/.....	Rp.	Rp.
4	Nilai asset yang dimiliki	Rp.	Rp.
5	Nilai tabungan yang dimiliki	Rp.	Rp.

**E. INFORMASI TERKAIT DPM dan KP3M**

1. Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi mengenai DPM dari KP3M?  
 (1) Teman / tetangga  
 (2) Staff KP3M  
 (3) Leaflet / selebaran / buletin dari KP3M / Pemda Sleman  
 (4) Pengumuman dari media masa (misalnya radio, tv, surat kabar)  
 (5) Lainnya:.....



2. Sebelum Bapak/Ibu memperoleh DPM apakah ada petugas dari instansi terkait yang melakukan survey kelayakan usaha Bpk/Ibu? (1). YA (2). TIDAK
3. Sebelum Bapak/Ibu memperoleh DPM apakah ada petugas dari KP3M yang melakukan verifikasi atas hasil survey kelayakan usaha Bapak/Ibu?  
(1). YA (2). TIDAK
4. Setelah Bapak/Ibu memperoleh DMP apakah ada petugas dari instansi terkait yang secara kotinyu memantau usaha Bapak/Ibu?  
(1). YA ( ..... kali /tahun) (2). TIDAK
5. Apakah KP3M memberikan bantuan selain berbentuk DPM kepada Bapak/Ibu?  
(1). YA (2). TIDAK
6. Jika "YA" apa bentuk layanan yang diberikan?  
(1). Konsultasi Usaha (2). Pelatihan Manajemen Usaha  
(3). Bantuan Pemasaran (4). Pendampingan Usaha  
(5). Lainnya: .....
7. Berkaitan dengan pengelolaan usaha Bapak/Ibu, layanan apakah yang sebenarnya Bapak/Ibu perlukan?  
Jawab: .....
8. Untuk Bapak/Ibu yang pernah tidak bisa membayar angsuran tepat waktu; apakah ada petugas dari KP3M yang menanyakan/mencari tahu penyebabnya?  
(1). YA (2). TIDAK
9. Untuk Bapak/Ibu yang bisa membayar angsuran tepat waktu, apa bentuk penghargaan dari KP3M yang diberikan kepada Bapak/Ibu?  
Jawab: .....
10. Untuk Bapak/Ibu yang bisa membayar angsuran tepat waktu, apa bentuk penghargaan yang sebenarnya Bapak/Ibu inginkan?  
Jawab: .....

#### F. PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI DPM DAN KEMANFAATAN DPM

Berikan penilaian Bapak/Ibu mengenai pernyataan pada tabel berikut dengan memberi tanda centang (V) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia!

- (1). Sangat Setuju [SS]; (2). Setuju [S],  
(3). Tidak Setuju [TS], (4). Sangat Tidak Setuju [STS]

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Pinjaman DPM diberikan tepat di saat saya membutuhkan tambahan modal				
2	Untuk usaha yang saya tekuni, kontribusi pinjaman yang harus saya bayar terlalu tinggi				
3	Untuk usaha yang saya tekuni, jumlah pinjaman DPM yang dicairkan terlalu kecil sehingga tidak cukup bermakna sebagai investasi				

4	Untuk usaha yang saya tekuni, jangka waktu pembayaran pinjaman terlalu pendek untuk dapat menghasilkan keuntungan				
5	Saya membayar angsuran pinjaman DPM dengan menggunakan hasil/keuntungan usaha saya				
6	Saya membayar angsuran pinjaman DPM dari sumber lain (bukan hasil usaha)				
7	Pinjaman DPM meningkatkan kinerja usaha saya				
8	Usaha saya mengalami perkembangan semenjak menerima pinjaman DPM.				
9	Tabungan saya bertambah sebagai hasil pinjaman DPM yang diperoleh.				
10	Saya mampu membayar angsuran tepat waktu.				
11	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu kesuksesan usaha saya				
12	Menurut saya pinjaman DPM telah berperan/membantu peningkatan kesejahteraan keluarga saya				
13	Bila KP3M tidak memberikan DPM maka saya akan kesulitan menjalankan usaha saya				
14	Secara umum pinjaman DPM bermanfaat untuk saya				

### G. PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI PROSES ADMINISTRATIF DPM

Berikan penilaian Bapak/Ibu mengenai pernyataan pada tabel berikut dengan memberi tanda centang (V) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia!

- (1). Sangat Setuju [SS];                                   (2). Setuju [S],  
 (3). Tidak Setuju [TS],                                   (4). Sangat Tidak Setuju [STS]

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Informasi mengenai DPM melalui KP3M mudah diperoleh				
2	Semua aturan yang berlaku terkait pinjaman DPM melalui KP3M mudah dipahami				
3	Prosedur pengajuan pinjaman DPM melalui KP3M berbelit-belit				
4	Keputusan KP3M dalam pemberian pinjaman DPM sesuai dengan hasil survey kelayakan usaha				
5	Proses pencairan dana pinjaman yang sudah disetujui mudah dilakukan				
6	Agar DPM yang disalurkan efektif, KP3M perlu melakukan pendampingan usaha bagi pihak penerima				
7	Pembinaan, pendampingan dan pemantauan yang dilakukan KP3M bermanfaat bagi perkembangan usaha				
8	Agar DPM yang disalurkan efektif peminjam perlu membuat laporan penggunaan DPM dan perkembangan usahanya secara berkala kepada KP3M				
9	Pembuatan laporan DPM dan perkembangan usaha secara berkala kepada KP3M sangat merepotkan				

10	Agar DPM yang disalurkan efektif, KP3M perlu memberika sanksi kepada pihak penerima yang tidak tepat waktu membayar angsuran				
11	Sanksi yang selama ini berlaku bila peminjam terlambat membayar angsuran terlalu berat				
12	Penghargaan yang diberikan KP3M bila saya membayar angsuran tepat waktu mendorong saya untuk lebih patuh membayar angsuran.				

H. Sebagai penerima pinjaman DPM, mohon Bapak dan Ibu bisa memberikan komentar mengenai kesulitan dalam pengelolaan pinjaman DPM atau usulan/saran berkaitan dengan program pemberian pinjaman DPM untuk perbaikan program ini ke depan.

1. Kesulitan dalam pengelolaan DPM (bisa lebih dari 1) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Saran (bisa lebih dari satu):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## I. TAMBAHAN INSTRUMEN BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1. Nama Usaha : .....
2. No. Telp/Hp. : .....
3. Bidang Usaha :
  - a. Pengolahan Makanan, Minuman, Tembakau
  - b. Fesyen/pakaian
  - c. Pengolahan barang dari kulit
  - d. Industri kertas/percetakan/penerbitan
  - e. Otomotif
  - f. Mebel/furniture
  - g. Elektronik
  - h. Lain-lain.....
4. Status Usaha :
  - a. Milik Sendiri
  - b. Sewa, dengan tarif Rp...../bulan/tahun
  - c. Lain-lain.....
5. Lokasi Usaha :
  - a. Menyatu
  - b. Terpisah
6. Permasalahan dalam mengembangkan usaha (boleh memilih lebih dari satu):
  - a. Tidak ada
  - b. Bahan baku
  - c. Permodalan
  - d. Pemasaran
  - e. Tenaga kerja
  - f. Persaingan usaha
  - g. Pemanfaatan IPTEK
  - h. Peralatan produksi
  - i. Lain-lain.....
7. Alasan awal mendirikan usaha:
  - a. Coba-coba
  - b. Mengisi waktu luang
  - c. Keluarga
  - d. Memiliki ketrampilan dalam bidang usaha yang digeluti
  - e. Memenuhi kebutuhan hidup
  - f. Melihat peluang pasar
  - g. Lain-lain.....

**\*\*\*TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA\*\*\***

#### 4. DATA PENGISIAN ANGKET

No. Resp.	KARAKTERISTIK UMUM RESPONDEN										KARAKTERISTIK USAHA									
	A1	Tambahan	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	B1	B2	B4	Lain	I3	I4	I5	I6	I7	Lain
1	ASTARIYATUN	COUTURE DE LALA ET TATA	Jl. Pengok Kidul 23/5,	2	0	7	1	2	2	0	KONVEKSI	2008	1		1	1	4	2,3,4,5,9	7	Hobi
2	HJ. ENDANG PUJI	QOLBUN SALIM	Klurak Baru, RT/RW	2	52	6	1	7	2	0	FARMASI	1999	1,4		1	2	4	3,9	4,5	
3	TULAKIR	PUTRA BANDHUNG B.	Klurak Baru 05/32,	1	35	4	1	5	2	0	KRJINAN FIBER GLASS	2000	1		1	1	4	3,5,8	5,6	
4	NGADIMAN	BATU ALAM RAYA	Nglengkong 02/17,	1	54	7	3	3	2	0	IND. PECH BATU	1990	1		1	1	4	3,6	3	
5	NGATIJO	UD. BATU ALAM PEG.	Gunungsari, RT/RW	1	57	3	1	3	1	2	PEMOTONGAN BATU	2001	1		1	1	4	2,6	5	
6	MUH. BISRI	PUTRA MANDIRI	Somokaton, RT/RW 05/,	1	55	4	1	4	1	1	-	2009	3		1	1	4	3,5,8,9	4,5,6	
7	TITIK YULIANI	SAHID JAYA	Somokaton, RT/RW 05/-,	2	44	7	3	1	1	1	MEBEL	1997	1		1	1	4	3,4,6,9	3,5	
8	HARMINI	MENIK'S	Kutu Ngemplak, RT/RW	2	0	4	1	3	1	3	-	-	1		1	1	4	3,5,7	5	
9	Sahibul Khoiri	UD. REZA MANDIRI	Ngemplak Caban, RT/RW	1	36	7	1	6	1	9	INDUSTRI CAT	2000	5	KP3M	1	1	4	3	4	
10	WIWIK DWI	CV. MULTIGUNA	Krikilan, RT/RW 05/22,	2	4	1	2	2	0		KONVEKSI	-	4		1	1	4	3,4	5	
11	HJ. SUNARTI	TRI BUSANA JASA	Cokrokonteng, RT/RW	2	68	4	3	5	1	3	TENUN	1972	1		1	2	4	3,5	3	
12	SUYANTI	SARI RASA	Konteng, RT/RW 05/16,	2	55	4	1	2	2	0	EMPING MLINJO	1990	1		1	1	4	2,3	4,6	
13	JOKO SUSILO	TB. JOKO MATERIAL	Morangan, RT/RW 01/05,	1	42	4	1	3	2	0	IND. PASIR SEMEN	2003	0		1	1	4	3,5,8	5	
14	KARTIKANINGSIH	ANGGREK	Jl. KRT. Pringgodingrat	2	0	4	1	3	1	3	Makanan Ringan	2000	1,4							
15	VERONIKA	GISA FOOD	Krikilan 03/21, Sariharjo,	2	48	4	1	3	2	0	MODISTE	2006	1		1	1	4	2,3	4	
16	DEWI RETNO	UD. ZAGO	Brongkol, RT/RW 04/18,	2	40	7	1	3	1	1	IND. PASIR SEMEN	2006	4		1	1	4	4,5,8,9	1,5	
17	NOORHIDAYATI	JEPARA MEDEL GROUP	Bantulan, RT/RW 04/06,	2	52	4	3	3	0	0	MEBEL	2000	4		1	1	4	3	3	
18	BUDI SANTOSO	UD. KARYAJAYA	Buyutan, RT/RW 04/04,	1	60	3	1	7	1	7	HOME INDUSTRI	1980	1		1	1	4	2,3,4,7	4	
19	RUSTININGSIH	RUSTY CRAFT	Kemal Kulon, RT/RW	2	32	7	2	0	2	0	KERAJINAN	2008	4		1	2	3	3,4,5	7	Hobi
20	SABIHARJO	AK SOKKA	Klangkapan II, RT/RW	1	54	4	1	2	2	0	IND. GENTENG	1990	4		1	1	4	2	3	
21	LAILA	CV. ART STRAWBERRY	Trini, RT/RW 08/18,	2	39	4	1	4	2	2	KERAJINAN	1998	4		1,2,3	2	4	3,5,6,9	6	
22	SUMIRAH	SOKKA INTI	Perum jogja Vilage B,	2	50	2	1	5	1	2	IND. GENTENG	1983	1		1	1	4	2,6	5	
23	SITI ROHMANI	WM. AYAM UNGKEP	Perum Nogotirto Asri No	2	44	7	1	2	1	1	RUMAH MAKAN	2010	3		2	2	3	4,6,9	5	
24	SARMIDI	USAHA MAJU	Jamblangan, RT/RW	1	52	4	1	3	1	1	KERAJINAN BAMBU	2000	1		1	1	4	2,5,9	3,5,6	
25	MULYANI	ROSA JAYA ABADI	Kenayan, RT/RW 01/29,	2	0	7	1	2	2	0	-	2000	4		1	1	4	4	5	
26	RAHAYU	SARI KEDELAI "ADE"	Jl. Panuluh 379 A,	2	51	8	1	2	2	0	MINUMAN	1996	1		1	1	4	3,4,7,8,9	5	
27	MARDIYANTO	EKA JAYA	Tinggen, RT/RW 01/19,	1	38	4	1	3	2	0	BENGKAL ALT TANI	2001	4		2	2	4	3,4,6,8	4,5	
28	MARIA SUYANTI	EPATA COLLECTION	Ngento-ento, RT/RW	2	51	4	3	0	1	1	KONVEKSI	2002	1,4		1	1	4	2,3,5,6	4,5,6	
29	ANITA	Perhn. Krupuk KMD	Durenan Tejo, RT/RW	2	34	6	1	0	2	0	Industri KRUPUK	1969	4		1	1	4	5	3	
30	SETYANA	RAPIH MOTOR	Ngino 03/10,	1	48	8	1	4	2	1	JASA	2007	1,4		1	2	4	1	6	

31	ATIK SUNARWATI	AADS	Temulawak 02/36,	2	35	6	1	2	2	0	IND. MAKANAN	2004	1		1	2	3	3,4,5,7,8	4,6
32	SUSI HARINI	MODISTE LIA	Kemusuh 01/19,	2	0	4	2	0	1	1	MAKANAN	2009	1		1	1	4	3,8	4
33	RIYO ETY	Batik Dinda Hayu	Munggon 02/20,	2	50	4	1	3	1	1	Batik dan Kerajinan	2009	1		1	1	4	3,6,8	2,4,5,6
34	SAKIMIN	SAKIMIN	Banyuurip III, RT/RW	1	50	3	1	3	1	4	BATU BATA	2001	4		1	2	4	3	5
35	MEI EKO M.	FAMILY CITRA ABADI	RT/RW 04/12,	2	32	4	1	0	1	1	PERDAGANGAN	2006	1		1	1	4	3,4	6
36	AGUNG	TB. DHIA SUKSES	Kepitu, RT/RW 04/18,	1	40	7	1	4	2	0	PERDAGANGAN	2000	4		1	1	4	3,5,9	6,7 Ingn Maju
37	MASDJAR SODIKI	SAMUDERA BETON HARTA	Jl. Semeru No. 47, Jl.	1	44	7	1	2	2	0	PROD. KRUPUK	2010	4		2	1	3	5,7,9	7 Terpaksa
38	ISAAC INDARTA	ROBERT'S SHOP	Jl. Gendol Km. 0,3	1	37	6	1	2	2	0	PERDAGANGAN	2004	1		1	1	4	3,4,5,7	4,5,6
39	AGUS HARIYADI	PP. SARWO KARYO	Klepu, Sendangmulyo,	1	34	7	1	3	2	0	MAKANAN POKOK	2008	1		1	1	4	2	7 Terpaksa
40	ANDRE KURNIA	PD. SURYA ABADI	Jl. Pringgodiningrat no.	1	33	7	1	2	2	0	PERCETAKAN	1995	1		1	1	4	3,9	6
41	EVY NUR	ALEA PRODUCTION	Jl. Kaliurang Km. 6,9 Gg.	2	35	7	1	0	2	0	KONVEKSI	2006	1		1	2	4	5	6
42	GANDUNG	UD. WARNO	REJODANI, SARIHARJO,	1	47	7	1	3	1	1	BAHAN BANGUNAN	1990	1,4		1	1	4	2,3,8	3
43	YUMI ASTUTI	TEPAT	Kutu Raden, RT/RW	2	47	4	3	2	1	0	PROD. TELUR ASIN	2000	4		1	1	4	5	3
44	WAHONO	PWS	Kunden VIII 02/18,	1	52	4	1	4	2	0	GENTENG	1985	4		1	2	4	2	3
45	JEMINA	MEKAR JAYA	Kaliduren III, RT/RW	1	54	1	1	4	2	0	MAKANAN	2013	1		1	1	2	4,8	
46	MARJONO	DIAN BARU	Kemloko, RT/RW 01/01,	1	41	3	1	5	2	0	OTOM. SPARE PART	2004	1		1	1	4	3,4	4
47	SRI ENDAH	INTAN RAHMADHANI	Jl. Solo KM.10, Sorogenen	2	44	7	1	4	2	0	IND. MAKANAN	2000	1		1	2	4	1	2
48	YULI HERI SETYO	UD. ANUNG	Blimbingan, Tambak Rejo,	1	33	6	1	3	1	3	HOME INDUSTRI	1980	1		1	1	4	3,4	4
49	TRI WINARNO	TRONTER AUTO SERVICE	Ngaglik, RT/RW 04/27,	1	39	4	1	2	2	0	OTOMOTIF	2000	1		1	1	4	3,5	4,6
50	PRASTIATI	WIDYA MODISTE	Bantulan, RT/RW 02/10,	2	61	4	3	1	2	0	MODISTE	1990	4		2	2	4	4,5,9	4

### ...DATA PENGISIAN ANGKET

No. Resp.	KARAKTERISTIK DPM																						
	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C21a	C21b	C22
1	30000000	2	2	3	1	24	3	1650000	24	2	24	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	1	0%	2	0	0	2,5
2	75000000	2	1,2	5	1	24	3	4125000	24	1	22	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
3	75000000	1	1,2	4	1	24	3	3300000	24	2	1	0	0	2	mnmbah modal	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	BRI	0	2
4	40000000	1	1,2	2	1	24	3	1650000	24	2	24	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
5	80000000	1	1	3	1	24	3	4400000	24	1	24	0	0	1	-	1	BPKB	2	0	2	0	0	1
6	25000000	2	2	3	1	24	3	1375000	24	1	17	0	0	2	LUPA TANGGAL	1	Sertifikat Tanah	1	0,30%	2	0	0	1
7	15000000	1	1	4	1	24	3	825000	24	2	7	0	0	2	blm mndpt untung	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	3,5,6
8	30000000	1	1	2	1	24	2	1650000	24	2	0	0	0	0	-	1	Sertifikat Tanah	0	0,05%	2	0	0	1
9	25000000	2	1	2	1	24	3	1500000	24	1	15	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
10	60000000	2	1	3	1	24	3	3300000	24	1	8	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	BPD	0,90%	1
11	17000000	1	1	4	1	24	3	935000	24	2	8	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	2,4
12	35000000	1	1	4	1	24	3	1925000	24	2	10	0	0	1	-	1	BPKB Mobil	2	0	2	0	0	5
13	100000000	1	1,2	3	1	24	3	5500000	24	2	2	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
14	35000000	1	1,2	3	1	24	3	175000	20	2	2	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
15	15000000	2	1	1	1	24	3	825000	24	2	2	0	0	1	-	1	Sertifikat	2	0	2	0	0	1
16	20000000	1	1	3	1	24	3	1100000	24	2	24	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	2,4,5
17	30000000	2	1	3	1	24	3	1650000	24	2	0	0	0	2	blm mndpt untung	1	BPKB	2	0	2	0	0	6
18	30000000	2	1,2	2	1	24	3	1650000	24	2	21	0	0	1	-	1	BPKB	2	0	2	BRI	0	2
19	40000000	1	1,2	2	1	24	3	2200000	24	2	5	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	0	0	0	1
20	40000000	2	1	4	1	24	3	1650000	24	2	24	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	BPD	0,50%	1
21	50000000	2	1	1	1	24	3	2750000	24	2	16	0	0	1	LUPA TANGGAL	1	Serifikat Tanah	2	0	1	BNI	0,75%	6
22	15000000	2	1	2	1	24	3	825000	24	1	16	0	0	2	blm mndpt untung	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	Mndiri	0	5
23	50000000	1	1	2	1	24	3	1125000	24	2	2	0	0	1	-	1	BPKB	2	0	1	BRI	1%	1
24	20000000	1	1	3	1	24	3	1100000	24	2	13	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	2,3
25	40000000	2	1,2	5	1	24	3	2200000	24	1	0	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	1	0	0	0	0	2,4,5,6
26	25000000	1	1	1	1	24	3	1375000	24	2	14	0	0	1	-	1	BPKB Mobil	2	0	2	0	0	1
27	90000000	2	2	5	2	24	3	4950000	24	2	5	0	0	1	-	2	-	2	0	0	0	0	1
28	25000000	1	1,2	4	1	24	3	1375000	24	2	6	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
29	40000000	1	1,2	5	1	24	3	2200000	20	2	8	0	0	1	-	1	BPKB Mobil	2	0	1	BPD	1,33%	1
30	40000000	2	1	3	1	24	3	2250000	2	2	2	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	BPD	1%	1

31	15000000	2	1	1	1	24	3	825000	24	2	2	0	0	1	-	1	BPKB	2	0	2	0	0	1
32	10000000	2	2	1	1	24	3	550000	24	2	5	0	0	2	pencairan lama	1	Sertifikat Tanah	2	0	0	0	0	1
33	50000000	2	1	3	1	24	3	2750000	24	2	4	0	0	0	-	1	Sertifikat Tanah	2	0,05%	2	0	0	4,5
34	10000000	2	1	2	0	24	3	550000	24	2	16	0	0	0	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
35	50000000	1	1	5	1	24	3	2750000	24	2	24	0	0	1	-	1	Serifikat Tanah	1	0%	2	0	0	0
36	100000000	2	1	1	1	24	3	0	2	24	0	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	1	0,25%	2	0	0	1
37	10000000	2	1,2	1	1	24	3	550000	24	1	?	0	0	0	-	1	BPKB Mobil	2	0	1	Mandiri	1,20%	3,4,6
38	50000000	0	1	2	1	24	3	2750000	24	2	8	0	0	1	-	1	Bpkb	2	0	1	BRI	1,08%	1
39	20000000	2	1	3	1	24	3	1000000	24	1	11	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	5
40	50000000	2	1	3	1	24	3	2000000	24	2	24	0	0	2	-	2	-	1	0%	2	0	0	2,3
41	75000000	1	1	3	1	24	3	4125000	24	1	6	0	0	1	-	1	Sertifikat TanaH	2	0	1	BRI	0,90%	1
42	40000000	1	2	5	1	24	3	2200000	24	2	2	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	2,5
43	25000000	1	1	2	1	24	3	1400000	24	1	12	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	BRI	2,50%	2
44	100000000	1	1,2	3	1	24	3	4200000	24	2	2	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	BRI	0,88%	1
45	15000000	2	2	3	1	24	3	825000	24	2	12	0	0	2	omset menurun	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	KOPERASI	0,50%	2,4
46	10000000	2	1	1	1	24	3	550000	24	2	14	0	0	2	omset menurun	1	Sertifikat Tanah	2	0	1	BPR	2,50%	1
47	15000000	1	1	3	1	24	3	825000	20	2	10	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
48	30000000	2	1	2	1	24	3	1650000	24	2	21	0	0	1	-	1	BPKB Mobil	2	0	1	BRI	1,08%	4
49	50000000	1	1,2	5	1	24	3	2750000	24	2	18	0	0	1	-	1	Sertifikat Tanah	2	0	2	0	0	1
50	25000000	2	1	2	1	24	3	1375000	24	2	20	0	0	1	-	1	BPKB	2	0	2	0	0	5



### ...DATA PENGISIAN ANGKET

No. Resp.	PERBANDINGAN SEBELUM DAN SETELAH DPM										INFORMASI DPM...							
	D1a	D1b	D2a	D2b	D3a	D3b	D4a	D4b	D5a	D5b	E1	Lain	E2	E3	E4	(kali/th)	E5	E6
1	5.000.000	30.000.000	2	8	3.000.000	5.000.000	15.000.000	40.000.000	-	-	1		1	2	2		1	3,2
2	50.000.000	78.000.000	8	13	10.000.000	15.000.000	225.000.000	300.000.000	25.000.000	31.000.000	2		1	1	1	2	1	1
3	50.000.000	80.000.000	-	12	3.000.000	10.000.000	-	-	-	-	2		1	1	1	2	2	0
4	40.000.000	60.000.000	2	2	2.000.000	3.000.000	30.000.000	60.000.000	-	2.000.000	1		2	2	2		2	0
5	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		1	1	1		2	0
6	1.000.000	3.500.000	2	6	2.000.000	6.000.000	10.000.000	25.000.000	-	-	1		1	2	2		2	0
7	10.000.000	15.000.000	1	1	5.000.000	7.000.000	12.000.000	15.000.000	500.000	1.000.000	1		1	1	1	2	2	0
8	10.000.000	12.000.000	-	3	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	1.500.000	1		1	1	2		2	0
9	100.000.000	125.000.000	2	5	5.000.000	15.000.000	150.000.000	350.000.000	-	-	3		1	1	1	4	1	4
10	30.000.000	90.000.000	8	10	700.000	900.000	60.000.000	140.000.000	10.000.000	15.000.000	2		2	2	2		2	0
11	30.000.000	50.000.000	2	5	4.000.000	6.500.000	45.000.000	50.000.000	17.000.000	22.000.000	2		1	2	2		2	0
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		1	1	2		2	0
13	150.000.000	250.000.000	12	12	10.000.000	10.000.000	350.000.000	400.000.000	-	-	1		1	1	1		2	0
14	20.000.000	60.000.000	3	5	30.000.000	60.000.000	10.000.000	20.000.000	70.000.000	100.000.000	2		1	1	1	2	1	1
15	50.000.000	75.000.000	2	2	3.000.000	3.500.000	40.000.000	40.000.000	-	-	1		1	2	2		2	0
16	2.000.000	12.000.000	1	2	1.000.000	2.000.000	12.000.000	20.000.000	-	4.000.000	2		1	1	2		2	0
17	200.000.000	230.000.000	7	1	15.000.000	5.000.000	1.872.500.000	1.872.500.000	-	-	2		2	2	1	1	2	0
18	50.000.000	80.000.000	5	7	20.000.000	25.000.000	75.000.000	100.000.000	10.000.000	20.000.000	4		1	1	1	1	2	0
19	90.000.000	200.000.000	15	15	3.000.000	5.000.000	-	-	-	-	2		1	1	1	2	1	4
20	12.000.000	24.000.000	-	-	6.000.000	8.000.000	54.000.000	68.000.000	-	-	1		1	1	1	2	2	0
21	300.000.000	350.000.000	50	60	10.000.000	12.000.000	500.000.000	505.000.000	100.000.000	100.000.000	2		1	1	2		1	2
22	5.000.000	15.000.000	6	6	1.000.000	2.000.000	10.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000	1		1	2	2		2	0
23	50.000.000	70.000.000	3	4	5.000.000	7.000.000	20.000.000	30.000.000	-	-	1		1	1	2		2	0
24	10.000.000	20.000.000	2	4	5.000.000	10.000.000	200.000.000	250.000.000	1.000.000	2.000.000	5	KKN-U	1	1	2		2	0
25	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2		1	1	1	1	1	2
26	10.000.000	35.000.000	12	13	4.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	7.500.000	2		1	1	1	1	2	0
27	40.000.000	70.000.000	18	18	18.000.000	18.000.000	150.000.000	400.000.000	50.000.000	200.000.000	2		1	1	2		1	2
28	8.000.000	15.000.000	4	4	1.500.000	3.000.000	4.000.000	8.500.000	18.000.000	20.000.000	1		1	1	2		2	0
29	25.000.000	40.000.000	28	28	75.000.000	84.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-	2		1	1	2		2	0
30	400.000.000	475.000.000	4	-	3.000.000	3.400.000	700.000.000	800.000.000	20.000.000	25.000.000	1		2	1	2		2	0

31	25.000.000	40.000.000	2	2	2.000.000	2.500.000	50.000.000	50.000.000	-	-	2	1	2	2	2	0	
32	20.000.000	30.000.000	3	3	2.000.000	2.000.000	80.000.000	100.000.000	-	-	2	1	1	1	1	2	0
33	100.000.000	150.000.000	10	-	3.000.000	5.000.000	-	200.000.000	-	150.000.000	2,3	1	1	1	2	2	0
34	10.000.000	15.000.000	6	6	10.000.000	15.000.000	-	-	-	-	1	1	2	2	2	0	
35	142.000.000	158.000.000	2	2	4.350.000	5.040.000	81.000.000	96.000.000	7.000.000	10.000.000	1	1	2	11	1	2	0
36	300.000.000	400.000.000	8	9	20.000.000	25.000.000	450.000.000	450.000.000	25.000.000	25.000.000	2	1	2	1	1	2	0
37	40.000.000	50.000.000	-	-	-	2.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	1	2	1	2	2	0	
38	50.000.000	100.000.000	2	4	9.000.000	15.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	-	-	4	1	1	1	2	2	0
39	50.000.000	70.000.000	2	2	1.500.000	1.750.000	100.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	1	1	1	2	2	0	
40	25.000.000	75.000.000	1	2	10.000.000	15.000.000	100.000.000	100.000.000	5.000.000	7.000.000	1	1	2	1	4	1	0
41	220.000.000	295.000.000	8	10	8.000.000	9.000.000	400.000.000	400.000.000	-	-	2	1	1	1	1	2	0
42	100.000.000	140.000.000	6	6	6.000.000	6.500.000	750.000.000	800.000.000	50.000.000	60.000.000	2	1	1	2	2	0	
43	5.000.000	7.000.000	-	-	1.500.000	2.000.000	10.000.000	12.000.000	-	-	1	1	1	2	2	0	
44	300.000.000	400.000.000	42	42	2.500.000	3.333.333	320.000.000	480.000.000	-	-	2	1	1	2	2	0	
45	20.000.000	25.000.000	2	2	2.000.000	3.000.000	20.000.000	28.000.000	-	-	1	2	1	2	2	0	
46	15.000.000	25.000.000	3	3	2.000.000	2.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	1	2	1	1	2	2	0
47	10.000.000	25.000.000	2	5	2.000.000	4.000.000	50.000.000	60.000.000	5.000.000	7.000.000	2	1	1	1	2	1	2
48	70.000.000	90.000.000	4	7	12.000.000	15.000.000	80.000.000	110.000.000	1.000.000	2.000.000	4	1	1	1	2	2	0
49	10.000.000	70.000.000	2	5	4.000.000	5.000.000	5.000.000	30.000.000	-	-	1	1	1	1	1	2	0
50	50.000.000	70.000.000	4	4	3.000.000	3.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	2	1	1	1	1	0	0

### ...DATA PENGISIAN ANGKET

No. Resp.	...INFORMASI DPM				PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI DPM...																
	E7	E8	E9	E10	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	G1	G2	G3
1	Bantuan Pemasaran	0	-	Pngmbalian angsurn	1	2	2	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
2		0	Kmudhn Pinjmn	Pngmbalian Kontrib	1	4	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
3	Pelatihan Manajemen Usaha	1	-	Kmudhn Pinjmn	1	3	3	3	2	3	1	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3
4	Pendampingan Usaha	0	Tidak Ada		2	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Penyederhanaan Syarat	1	Tidak Ada		1	2	3	2	2	4	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6		2	Tidak Ada		1	2	3	2	1	3	2	2	3	2	2	1	4	2	3	1	3
7	Pendampingan Usaha	2	Peningktn Jumlh Pinjmn	Pngmbalian angsurn	1	2	1	1	2	3	2	1	0	2	2	2	1	2	2	2	3
8		2	-	bantuan alat	2	3	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
9	Modal	0	-	pngktn jumlh pnjm	1	4	3	4	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4
10	Program Pameran	0	Tidak Ada	tmbhbn modal	2	3	1	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3
11	Pelatihan Manajemen Usaha	2	Tidak Ada	Kmudhn Pinjmn	1	3	3	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	3
12	Bantuan Pemasaran	0	Tidak Ada		2	2	3	2	2	3	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	3
13	Studi Banding	0	Tidak Ada	bantuan alat	1	3	2	3	1	3	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	3
14	Pendampingan Usaha	1	Kmudhn Pinjmn	Kmudhn Pinjmn	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
15	Bantuan Peralatan Produksi	0	Tidak Ada		2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3
16		0	Tidak Ada	Pengurangan Angsuran	1	4	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
17	Modal Dan Pemasaran	1	-		2	3	2	0	2	3	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2
18	Bantuan Pemasaran	0	Tidak Ada	Tambahan Modal	2	2	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
19		1	Tidak Ada	Kmudhn Pinjmn	2	0	2	2	2	3	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	3
20	Bantuan Pemasaran	1	Pembebasan Kontribusi	Tambahan Modal	1	2	2	2	2	3	2	2	2	0	1	2	3	2	2	2	3
21		2	Potongan Angsuran	Kmudhn Pinjmn	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	3
22		2	Kenang-Kenangan	Hadiah	1	3	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	3
23	Bantuan Pemasaran	0	Tidak Ada		1	3	3	2	2	3	1	2	3	1	1	2	2	1	1	1	3
24	Bantuan Hibah	0	Tidak Ada	Pencairan Dipercepat	1	3	1	3	1	3	1	2	2	2	2	1	3	2	2	2	2
25	Bantuan Pemasaran	1	Kmudhn Pinjmn	Tnp agunan	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	3
26	Pelatihan Pengemasan Produk	0	Kmudhn Pinjmn	pngktn jumlh pnjm	1	3	2	3	1	3	1	1	1	1	1	1	3	2	1	1	4
27	Peralatan Produksi	0	Tidak Ada	Pngmbalian Kontrib	3	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3
28		1	Kmudhn Pinjmn	Tidak Ada	1	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
29		0	Tidak Ada		1	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
30		0	Tidak Ada	Pengurangan Angsuran	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	1

31	Konsultasi Usaha	0	-	Pnurunan Kontrib	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	
32	Pelatihan Manajemen Usaha	1	-	-	4	4	3	4	1	3	1	1	2	3	1	1	4	1	1	1	1	
33	Layanan Transportasi	2	Tidak Ada	Pngmblian Angsuran	1	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
34	Peralatan Produksi	2	Tidak Ada	Kmudhn Pinjmn	1	3	4	3	2	3	0	1	0	2	1	1	2	1	1	1	1	
35		-	0	-	Pngmbalian Kontrib	1	2	2	3	2	0	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	3
36	Bimtek	1	Pembebasan Kontribusi	-	2	2	1	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	
37	Pengelolaan Keuangan	2	Kmudhn Pinjmn	-	2	1	1	3	2	3	1	2	3	3	1	1	4	1	3	3	2	
38	Mnjmen Keu dan Pemsrn	1	Tawaran Pinjaman Lagi	-	1	3	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	3	1	2	2	4	
39	Konsultasi Usaha	2	Kmudhn Pinjmn	Pngmbalian Kontrib	1	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	
40	Bantuan Pemasaran	0	Tidak Ada	Hadiah	1	1	1	1	2	3	0	2	3	2	1	2	1	2	3	2	2	
41	Pelatihan Sdm	0	-	-	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	
42		-	1	Kmudhn Pinjmn	Pngmbalian Kontrib	1	3	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1	2	2	1	1	3
43	Bantuan Pemasaran	0	Tidak Ada	Prosedur Dimudhkn	1	3	3	3	2	3	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	
44	Konsultasi Usaha	2	Tidak Ada	Pngmbalian angsurn	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
45	Bantuan Peralatan Produksi	2	Tidak Ada	Pngmbalian angsurn	2	3	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	
46	Pendampingan Usaha	0	Tidak Ada	bantuan alat	2	3	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	
47		-	1	-	-	1	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
48	Bantuan Pemasaran	2	-	-	2	2	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	
49	Pinjaman Kredit Usaha	0	Tidak Ada	Pnurunan Kontrib	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	
50	Bantuan Pemasaran	1	-	-	2	0	2	0	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	

### ...DATA PENGISIAN ANGKET

No. Resp.	PERSEPSI RESPONDEN MENGENAI DPM...								KESULITAN DAN SARAN UNTUK DPM	
	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	H1	H2
1	1	1	1	4	4	2	4	2	Jgk waktu pmbyrn pendek	Pnjmn hrsu sesuai permhonan, Petugs lbih aktif
2	1	1	1	1	4	1	0	1		- Pengembalian Kontribusi Yg Belum Jatuh Tempo
3	2	1	2	2	3	2	3	2		-
4	2	2	2	3	2	2	3	2		-
5	2	2	2	2	3	3	3	2	Mnjmen Keuangan	-
6	2	1	1	4	1	2	2	1	Angsuran Lupa	Syarat Dipermudah, Diadakan Pelatihan
7	2	2	2	2	2	3	2	1		-
8	2	2	2	3	3	2	3	2		- Diperbesar pinjmny
9	1	1	1	2	3	2	3	1	Tidak Ada	Dana Tambahan 3 Bulanan
10	1	3	3	4	1	2	2	1	Tenaga Kerja	Dna Tmbhn, Waktu Pengembalian Ditambah
11	2	1	1	2	3	2	3	2	Lupa angsuran	Pengingat Untuk Mengangsur
12	1	2	1	3	2	3	1	2	Tidak Ada	Pinjaman Modal Lebih Besar Lagi
13	1	1	1	3	2	1	2	1	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Waktu Jatuh Tempo Diberi Tahu
14	2	2	2	2	3	2	3	2	Manajemen Keuangan	Perlu Pelatihan Manajemen Keuangan Dan Pemasaran
15	2	3	3	3	1	1	3	2	Modal Tidak Cukup, Pemasaran Sulit	Suntikan Modal Lagi, Timing Pinjaman Harus Lebih Tepat
16	2	2	1	2	2	1	2	1	Bencana Alm	Pinjaman Modal Lebih Besar Lagi
17	1	2	1	3	2	2	4	1	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Proses Pencairan Dana Dipercepat
18	2	2	2	2	2	4	0	2	Kesulitan Bahan Baku	Pembayaran Angsuran Bisa Dengan Auto Debet
19	2	2	2	2	2	3	3	0	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Dana Pinjaman Disesuaikan Dengan Kebutuhan
20	2	2	1	1	2	2	3	2	Manajemen Keuangan	Dipermudah Dalam Pembuatan Ho
21	2	2	2	2	3	2	3	2		-
22	2	2	2	3	2	3	3	2	Jgk waktu pencairan lama	Diberikan Hibah
23	1	1	2	3	2	2	0	1	Jgk waktu pencairan lama	Pinjaman Modal Lebih Besar Lagi
24	3	2	2	3	2	3	0	2	Penggunaan Agunan, Perpanjang Surat	Jumlah Dan Ditambah, Syarat Dipermudah
25	2	2	2	3	2	3	3	2		-
26	2	2	1	2	3	2	3	1		-
27	2	2	2	3	2	2	3	2		- Pinjaman Modal Lebih Besar Lagi
28	1	3	3	3	2	3	3	1	Wktu Pencairan Terlmbt	Pendampingan Usaha Dan Pelatihan
29	2	2	2	3	2	2	3	2	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Pemenuhan Permohonan Alat Transportasi
30	1	1	1	1	1	1	1	1		- Pencairan Pinjaman Dipercepat

31	2	2	2	3	2	1	3	1	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Jangka Waktu Pelunasan Diperpanjang
32	4	1	1	1	3	2	1	1		- Jumlah Modal Yang Lebih Besar
33	2	2	2	2	2	2	3	2	Mengelola Keuangan	Diadakan Pendampingan Usaha
34	3	1	3	2	1	4	4	1	Manajemen Keuangan	Pendampingan Usaha Dan Pelatihan
35	1	2	1	1	4	0	2	1	Manajemen Keuangan	Pinjaman Modal Lebih Besar Lagi
36	1	3	3	3	1	2	3	1	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Tenggang Waktu Angsuran Diperpanjang
37	1	1	1	1	4	3	3	4		-
38	1	2	1	4	1	2	4	1		-
39	2	2	2	3	3	2	3	2	Tidak Ada	Kemudhn kredit
40	1	2	1	2	2	2	2	1		- Dan Jangka Waktu Lebih Dari 24 Bulan
41	2	2	2	2	3	3	3	2	Kesulitan Mempertahankan Usaha	Diperlukan Pendampingan Usaha
42	1	2	2	2	2	1	2	2	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Informasi Mengenai Dpm Lebih Transparan
43	2	3	2	3	2	2	3	1		-
44	2	2	2	3	1	2	3	1	Jangka Waktu Pembayaran Terlalu Pendek	Keringanan Angsuran
45	2	2	2	3	2	3	2	2		- Besarnya Pinjaman Modal Ditambah
46	2	1	2	2	3	3	2	2		-
47	2	2	2	2	3	3	3	2	Jangka Waktu Pembayaran Terlalu Pendek	Bunga Di Perkecil
48	2	2	2	2	2	4	2	2		-
49	2	2	2	3	2	2	3	2	Jumlah Pinjmn Lebh Kecl dr Permohonn	Besarnya Pinjaman Modal Ditambah
50	2	1	1	2	2	2	3	2		-